
Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

SUMATERA BARAT 2017 - 2018



<https://sumbar.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

SUMATERA BARAT 2017 - 2018



STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SUMATERA BARAT 2017-2018

ISSN	: 2477-0744
No. Publikasi	: 13540.1904
Katalog	: 7203005.13
Ukuran Buku	: 21 cm X 29,7 cm
Jumlah Halaman	: xx + 84 Halaman
Naskah	: Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Sumatera Barat
Penyunting	: Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Sumatera Barat
Gambar Kulit	: Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Sumatera Barat
Ilustrasi Kulit	: Mata uang rupiah
Diterbitkan oleh	: ©Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat
Dicetak oleh	: CV Graphic Dwipa (Cetakan I)

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat (UU No. 28 Tahun 2014-2016 Tentang Hak Cipta Pasal 43 huruf b).

**STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
SUMATERA BARAT 2017-2018**

Anggota Tim Penyusun:

Pengarah : Dr. Ir. Sukardi, M.Si

Editor : Teguh Sugiyarto, M.Pop. Hum, Ph.D

Ichsan, S.ST

Yerison Buchari, S.ST, M.Si

Dr. Rita Diana, S.Si, M.Si

Riza Ulfina, SST, M.Si

Penulis : Ilhamiwitri, SE, MM

<https://sumbar.bps.go.id>

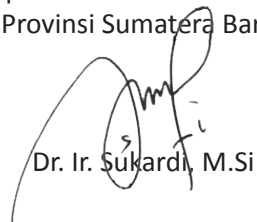
KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Sumatera Barat 2017-2018 ini merupakan kelanjutan dari publikasi yang sama pada tahun-tahun yang lalu. Tahun ini diterbitkan kembali dengan mengikuti format dari laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintahan daerah.

Data dalam publikasi ini disajikan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dirinci menurut sumber-sumber penerimaan dan pendistribusian pengeluaran-pengeluarannya. Disamping itu, publikasi ini juga menyajikan cakupan data, metode pengumpulan data, definisi dan konsep, serta ulasan singkat mengenai keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut dimaksudkan untuk dapat membantu pemakai data dalam memahami data-data yang disajikan.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi sehingga dapat terbitnya publikasi ini disampaikan terima kasih. Mudah-mudahan statistik yang disajikan memberi manfaat bagi banyak pihak untuk berbagai keperluan. Kami mengharapkan tanggapan dan saran dari para pengguna publikasi ini untuk perbaikan yang akan datang.

Padang, Mei 2019
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Sumatera Barat



Dr. Ir. Sukardi, M.Si

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
PENJELASAN UMUM	1
A. Pendahuluan	1
B. Ruang Lingkup dan Metode Pengumpulan Data	1
C. Konsep Definisi	2
D. Ulasan Singkat	7
1. Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	7
2. Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	9
LAMPIRAN TABEL	13
DAFTAR PUSTAKA	84

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Realisasi Pendapatan dan Pengeluaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2018 (Ribuan Rupiah)	8
Tabel 2 Realisasi Pendapatan dan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun 2016-2018 (Ribuan Rupiah)	11

<https://sumbar.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1	9
Persentase Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Menurut Jenis Pendapatan Tahun 2017	
Gambar 2	10
Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, 2013-2018 (Miliar Rupiah)	
Gambar 3	12
Realisasi Pendapatan dan Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, Tahun 2017 (Miliar Rupiah)	

<https://sumbar.bps.go.id>

DAFTAR LAMPIRAN

		Halaman
Tabel 1	Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Menurut Komponen Penerimaan, 2017-2018 (Ribuan Rupiah)	15
Tabel 1.1	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Menurut Komponen Penerimaan, 2017-2018 (Ribuan Rupiah)	16
Tabel 1.1.1	Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Menurut Komponen Penerimaan, 2017-2018 (Ribuan Rupiah)	17
Tabel 1.1.2	Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Menurut Komponen Penerimaan, 2017-2018 (Ribuan Rupiah)	18
Tabel 1.1.3	Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Menurut Komponen Penerimaan, 2017-2018 (Ribuan Rupiah)	19
Tabel 1.1.4	Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung Menurut Komponen Penerimaan, 2017-2018 (Ribuan Rupiah)	20
Tabel 1.1.5	Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Menurut Komponen Penerimaan, 2017-2018 (Ribuan Rupiah)	21
Tabel 1.1.6	Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Menurut Komponen Penerimaan, 2017-2018 (Ribuan Rupiah)	22
Tabel 1.1.7	Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Menurut Komponen Penerimaan, 2017-2018 (Ribuan Rupiah)	23
Tabel 1.1.8	Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Menurut Komponen Penerimaan, 2017-2018 (Ribuan Rupiah)	24
Tabel 1.1.9	Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Menurut Komponen Penerimaan, 2017-2018 (Ribuan Rupiah)	25
Tabel 1.1.10	Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Menurut Komponen Penerimaan, 2017-2018 (Ribuan Rupiah)	26
Tabel 1.1.11	Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Menurut Komponen Penerimaan, 2017-2018 (Ribuan Rupiah)	27

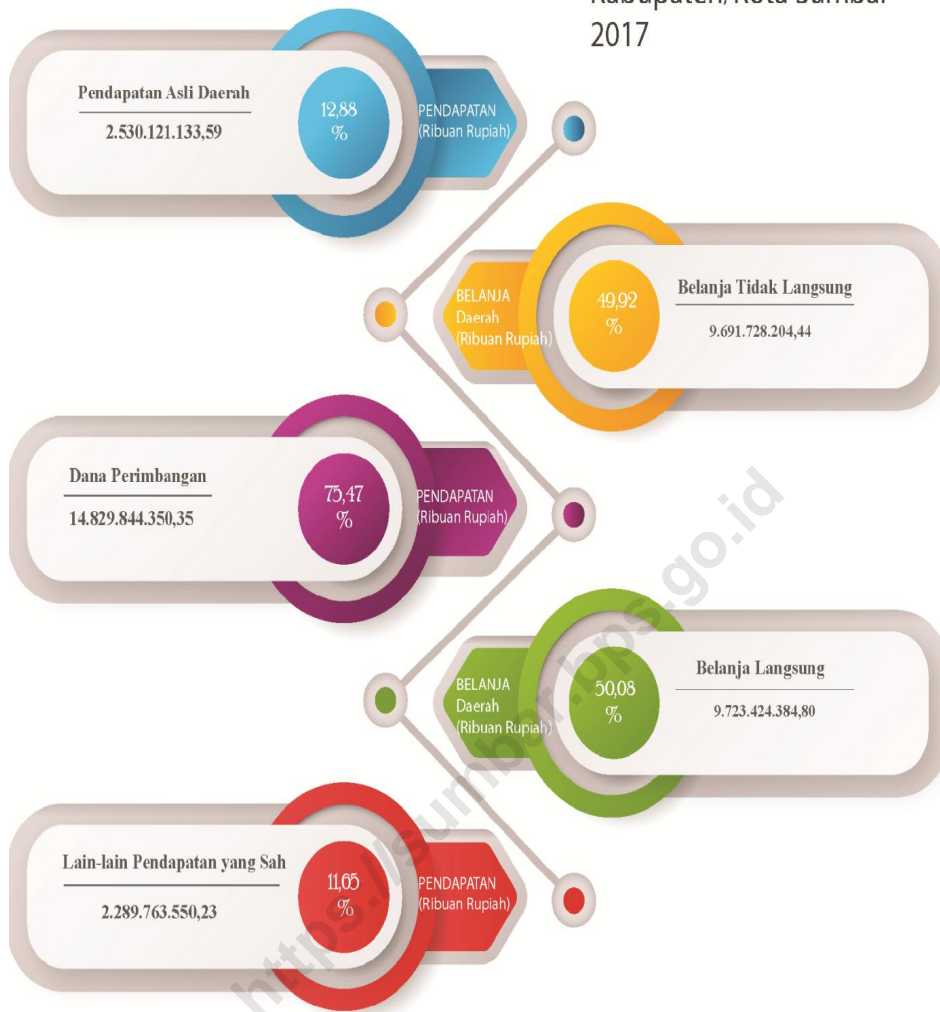
	Halaman	
Tabel 1.1.12	Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Menurut Komponen Penerimaan, 2017-2018 (Ribuan Rupiah)	28
Tabel 1.1.13	Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kota Padang Menurut Komponen Penerimaan, 2017-2018 (Ribuan Rupiah)	29
Tabel 1.1.14	Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kota Solok Menurut Komponen Penerimaan, 2017-2018 (Ribuan Rupiah)	30
Tabel 1.1.15	Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto Menurut Komponen Penerimaan, 2017-2018 (Ribuan Rupiah)	31
Tabel 1.1.16	Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Menurut Komponen Penerimaan, 2017-2018 (Ribuan Rupiah)	32
Tabel 1.1.17	Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Menurut Komponen Penerimaan 2017-2018 (Ribuan Rupiah)	33
Tabel 1.1.18	Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Menurut Komponen Penerimaan, 2017-2018 (Ribuan Rupiah)	34
Tabel 1.1.19	Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kota Pariaman Menurut Komponen Penerimaan, 2017-2018 (Ribuan Rupiah)	35
Tabel 2	Realisasi Pendapatan Daerah Menurut Kabupaten/Kota, 2017-2018 (Ribuan Rupiah)	36
Tabel 2.1	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Menurut Kabupaten/Kota, 2017-2018 (Ribuan Rupiah)	37
Tabel 2.1.1	Realisasi Pajak Daerah Menurut Kabupaten/Kota, 2017-2018 (Ribuan Rupiah)	38
Tabel 2.1.2	Realisasi Retribusi Daerah Menurut Kabupaten/Kota, 2017-2018 (Ribuan Rupiah)	39
Tabel 2.1.3	Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Menurut Kabupaten/Kota, 2017-2018 (Ribuan Rupiah)	40
Tabel 2.1.4	Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Menurut Kabupaten/Kota, 2017-2018 (Ribuan Rupiah)	41
Tabel 2.2	Realisasi Dana Perimbangan Menurut Kabupaten/Kota, 2017-2018 (Ribuan Rupiah)	42

	Halaman	
Tabel 2.2.1	Realisasi Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Menurut Kabupaten/ Kota, 2017-2018 (Ribuan Rupiah)	43
Tabel 2.2.2	Realisasi Dana Alokasi Umum Menurut Kabupaten/Kota, 2017-2018 (Ribuan Rupiah)	44
Tabel 2.2.3	Realisasi Dana Alokasi Khusus Menurut Kabupaten/Kota, 2017-2018 (Ribuan Rupiah)	45
Tabel 2.3	Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Menurut Kabupaten/ Kota, 2017-2018 (Ribuan Rupiah)	46
Tabel 2.4	Realisasi Penerimaan Pembiayaan Menurut Kabupaten/Kota, 2017- 2018 (Ribuan Rupiah)	47
Tabel 3	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Menurut Komponen Pengeluaran, 2017-2018 (Ribuan Rupiah)	48
Tabel 3.1	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Menurut Komponen Pengeluaran, 2017-2018 (Ribuan Rupiah)	49
Tabel 3.1.1	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Menurut Komponen Pengeluaran, 2017-2018 (Ribuan Rupiah)	50
Tabel 3.1.2	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Menurut Komponen Pengeluaran, 2017-2018 (Ribuan Rupiah)	51
Tabel 3.1.3	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Menurut Komponen Pengeluaran, 2017-2018 (Ribuan Rupiah)	52
Tabel 3.1.4	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung Menurut Komponen Pengeluaran, 2017-2018 (Ribuan Rupiah)	53
Tabel 3.1.5	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Menurut Komponen Pengeluaran, 2017-2018 (Ribuan Rupiah)	54
Tabel 3.1.6	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Menurut Komponen Pengeluaran, 2017-2018 (Ribuan Rupiah)	55
Tabel 3.1.7	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Menurut Komponen Pengeluaran, 2017-2018 (Ribuan Rupiah)	56

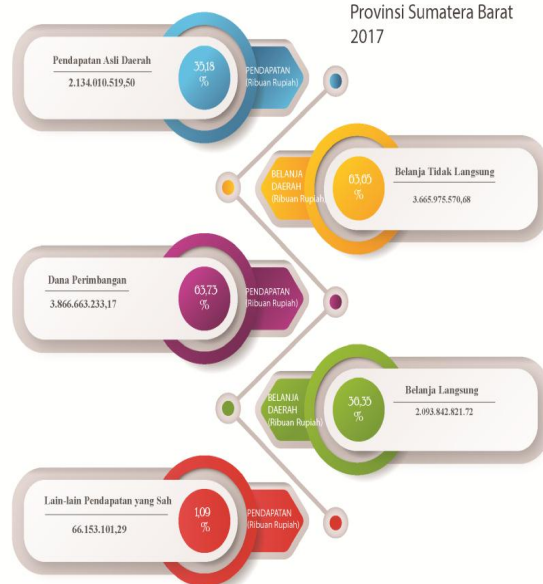
	Halaman	
Tabel 3.1.8	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Menurut Komponen Pengeluaran, 2017-2018 (Ribuan Rupiah)	57
Tabel 3.1.9	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Menurut Komponen Pengeluaran, 2017-2018 (Ribuan Rupiah)	58
Tabel 3.1.10	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Menurut Komponen Pengeluaran, 2017-2018 (Ribuan Rupiah)	59
Tabel 3.1.11	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Menurut Komponen Pengeluaran, 2017-2018 (Ribuan Rupiah)	60
Tabel 3.1.12	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Menurut Komponen Pengeluaran, 2017-2018 (Ribuan Rupiah)	61
Tabel 3.1.13	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kota Padang Menurut Komponen Pengeluaran, 2017-2018 (Ribuan Rupiah)	62
Tabel 3.1.14	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kota Solok Menurut Komponen Pengeluaran, 2017-2018 (Ribuan Rupiah)	63
Tabel 3.1.15	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto Menurut Komponen Pengeluaran, 2017-2018 (Ribuan Rupiah)	64
Tabel 3.1.16	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Menurut Komponen Pengeluaran, 2017-2018 (Ribuan Rupiah)	65
Tabel 3.1.17	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Menurut Komponen Pengeluaran, 2017-2018 (Ribuan Rupiah)	66
Tabel 3.1.18	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Menurut Komponen Pengeluaran, 2017-2018 (Ribuan Rupiah)	67
Tabel 3.1.19	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kota Pariaman Menurut Komponen Pengeluaran, 2017-2018 (Ribuan Rupiah)	68
Tabel 4	Realisasi Belanja Daerah Menurut Kabupaten/Kota, 2017-2018 (Ribuan Rupiah)	69
Tabel 4.1	Realisasi Belanja Tidak Langsung Menurut Kabupaten/Kota, 2017-2018 (Ribuan Rupiah)	70

	Halaman	
Tabel 4.1.1	Realisasi Belanja Tidak Langsung, Belanja Pegawai Menurut Kabupaten/ Kota, 2017-2018 (Ribuan Rupiah)	71
Tabel 4.1.2	Realisasi Belanja Bunga Menurut Kabupaten/Kota, 2017-2018 (Ribuan Rupiah)	72
Tabel 4.1.3	Realisasi Belanja Subsidi Menurut Kabupaten/Kota, 2017-2018 (Ribuan Rupiah)	73
Tabel 4.1.4	Realisasi Belanja Hibah Menurut Kabupaten/Kota, 2017-2018 (Ribuan Rupiah)	74
Tabel 4.1.5	Realisasi Belanja Bantuan Sosial Menurut Kabupaten/Kota, 2017-2018 (Ribuan Rupiah)	75
Tabel 4.1.6	Realisasi Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Menurut Kabupaten/Kota, 2017-2018 (Ribuan Rupiah)	76
Tabel 4.1.7	Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Menurut Kabupaten/Kota, 2017-2018 (Ribuan Rupiah)	77
Tabel 4.1.8	Realisasi Belanja Tidak Terduga Menurut Kabupaten/Kota, 2017-2018 (Ribuan Rupiah)	78
Tabel 4.2	Realisasi Belanja Langsung Menurut Kabupaten/Kota, 2017-2018 (Ribuan Rupiah)	79
Tabel 4.2.1	Realisasi Belanja Langsung Belanja Pegawai Menurut Kabupaten/ Kota, 2017-2018 (Ribuan Rupiah)	80
Tabel 4.2.2	Realisasi Belanja Barang dan Jasa Menurut Kabupaten/Kota, 2017-2018 (Ribuan Rupiah)	81
Tabel 4.2.3	Realisasi Belanja Modal Menurut Kabupaten/Kota, 2017-2018 (Ribuan Rupiah)	82
Tabel 4.3	Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Menurut Kabupaten/Kota, 2017-2018 (Ribuan Rupiah)	83

Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sumbar 2017



Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat 2017



PENJELASAN UMUM

A. Pendahuluan

Publikasi “Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Sumatera Barat 2017-2018” ini menyajikan data APBD dan realisasi APBD. Data tersebut meliputi penerimaan dan pengeluaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota Sumatera Barat. Data publikasi ini diperoleh dari kegiatan Survei Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang merupakan salah satu kegiatan rutin tahunan bidang Statistik Distribusi.

Beberapa indikator dan informasi penting yang dapat diperoleh, antara lain :

1. Memberikan gambaran tentang anggaran dan realisasi penerimaan dan pengeluaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
2. Untuk mengetahui potensi dan peranan sumber dana dari masing-masing daerah.
3. Memberikan informasi bagi pemerintah pusat dalam menentukan jenis dan besarnya bantuan pembangunan untuk masing-masing daerah.

Dengan demikian, publikasi ini dapat digunakan sebagai sumber informasi mengenai potensi dan kemampuan dari masing-masing daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Data tersebut juga dapat digunakan dalam perencanaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah masing-masing.

B. Ruang Lingkup dan Metode Pengumpulan Data

Data yang disajikan dalam publikasi ini untuk tahun 2017 adalah data realisasi penerimaan dan pengeluaran, sedangkan untuk tahun 2018 adalah data anggaran penerimaan dan pengeluaran. Data ini meliputi pendapatan dan pengeluaran pemerintah provinsi dan 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat. Sisi penerimaan terdiri dari pendapatan daerah (pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah) dan penerimaan pembiayaan (sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu ditambah lain-lain penerimaan). Sisi pengeluaran terdiri dari belanja langsung (belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja tidak terduga) dan pengeluaran pembiayaan

(sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan ditambah lain-lain pengeluaran).

Data ini dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan daftar K-1 dan APBD-1, untuk kabupaten/kota menggunakan daftar K-2 dan APBD-2. Sumber data diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan Daerah Kantor Gubernur di Provinsi Sumbar, sementara di kabupaten/kota data diperoleh dari kantor bupati/walikota bagian keuangan. Data ini dikumpulkan secara sensus pada setiap kabupaten/kota.

C. Konsep Definisi

Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah adalah realisasi/penghitungan APBD provinsi maupun kabupaten/kota pada setiap tahun anggaran.

Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari bagi hasil pajak/bukan pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan atau dari instansi pusat, serta daerah lainnya. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil dari provinsi dan pemerintah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah lainnya.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah terdiri dari belanja tak langsung dan belanja langsung.

Belanja Tak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program. Belanja tak langsung terdiri dari belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang telah ditetapkan undang-undang, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan, serta belanja tak terduga.

Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Termasuk disini uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta penghasilan dan penerimaan lainnya.

Belanja Bunga adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung berdasarkan kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Belanja Subsidi adalah belanja yang telah dianggarkan dan digunakan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi barang/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Tentunya perusahaan/lembaga tersebut menghasilkan produk atau jasa untuk pelayanan masyarakat umum.

Belanja Hibah adalah belanja yang telah dianggarkan untuk diberikan kepada pihak lain sebagai hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa. Hibah dapat diberikan kepada pemerintah pusat, Pemerintah lainnya, pemerintah desa, perusahaan daerah/BUMN/BUMD, badan/lembaga/organisasi swasta, ataupun kelompok masyarakat/perorangan.

Belanja Bantuan Sosial adalah belanja yang telah dianggarkan untuk memberikan bantuan kepada organisasi kemasyarakatan, partai politik, dan yang lainnya dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa adalah belanja yang telah dianggarkan sebagai dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota, kepada desa, atau pendapatan pemerintah tertentu kepada pemerintah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja bagi hasil ini terdiri dari:

- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah provinsi
- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota
- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa
- Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah kabupaten/kota
- Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa adalah pemberian bantuan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota, kepada pemerintah desa, atau pemerintah lainnya dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan yang bersifat umum, peruntukan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah/pemerintah desa penerima bantuan. Sedangkan bantuan keuangan yang bersifat khusus, peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah pemberi bantuan. Bantuan keuangan ini terdiri dari :

- Bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi
- Bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota
- Bantuan keuangan kepada pemerintah desa
- Bantuan keuangan kepada pemerintah/pemerintah desa lainnya

Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Belanja Langsung adalah bagian belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah dan telah dianggarkan oleh pemerintah.

Belanja Pegawai adalah pengeluaran untuk honorarium/upah, lembur, dan pengeluaran lain untuk meningkatkan motivasi dan kualitas pegawai dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah. Belanja pegawai terdiri dari honorarium PNS, honorarium non PNS, uang lembur, belanja beasiswa, kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS.

Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah. Pembelian/pengadaan barang dan jasa yang dimaksud meliputi bahan pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, sewa gedung, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atribut, pakaian kerja, pakaian khusus hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan pindah tugas, pemulangan pegawai, dan lain-lain belanja barang dan jasa.

Belanja Modal adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah. Pembentukan aset tersebut meliputi pengadaan tanah, alat-alat berat, alat-alat angkutan, alat-alat bengkel, alat-alat pertanian, peralatan dan perlengkapan kantor, komputer, peralatan dapur, penghias ruangan, alat-alat studio, alat-alat komunikasi, alat-alat ukur, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, konstruksi jalan, jembatan, jaringan air, penerangan jalan, taman dan hutan kota, instalasi listrik, dan telepon.

Penerimaan Pembiayaan Daerah terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.

Pengeluaran Pembiayaan Daerah terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah.

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berkenan adalah pos yang digunakan untuk mengetahui pembiayaan netto, yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.

<https://sumbar.bps.go.id>

D. Ulasan Singkat

1. Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Realisasi pendapatan pemerintah tingkat Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2017 tercatat sebesar 6.066,83 miliar rupiah atau naik 31,18 persen dari tahun sebelumnya. Tahun 2018 dianggarkan naik 6,02 persen atau sebesar 6.431,90 milyar rupiah. Realisasi pendapatan pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2017 didominasi oleh dana perimbangan sebesar 3.866,66 miliar rupiah (63,73 persen), diikuti Pendapatan Asli Daerah sebesar 2.134,01 miliar rupiah (35,18 persen), dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 66,15 miliar rupiah (1,09 persen). Hal ini bisa dilihat pada Tabel 1.

Peningkatan realisasi pendapatan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 diakibatkan adanya kenaikan pada dana perimbangan sebesar 50,06 persen dibandingkan tahun 2016. Sementara Pendapatan Asli Daerah hanya mengalami kenaikan sekitar 8,65 persen. Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami penurunan sekitar 21,03 persen.

Sumber terbesar Pendapatan Asli Daerah pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 berasal dari pajak daerah 1.626,92 miliar rupiah (76,24 persen) dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 389,57 miliar rupiah (18,26 persen). Sisanya berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 94,61 miliar rupiah (4,43 persen) dan retribusi daerah sebesar 22,91 miliar rupiah (1,07 persen) Tabel 1 (lampiran).

Sementara itu, kontribusi tahun 2017 terbesar pada dana perimbangan berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 2.014,64 miliar rupiah atau sekitar 52,10 persen, diikuti Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 1.699,58 milyar rupiah (43,95 persen). Sedangkan dana bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak hanya memberikan kontribusi sebesar 152,43 miliar rupiah (3,94 persen).

Dilihat dari sisi belanja daerah pemerintah daerah tingkat Provinsi Sumatera Barat, realisasinya pada tahun 2017 tercatat sebesar 5.759,82 miliar rupiah, atau meningkat sebesar 27,88 persen dibanding tahun 2016. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan pada belanja langsung sebesar 40,97 persen, serta didukung dengan adanya kenaikan pada belanja tidak langsung, sebesar 9,99 persen.

Realisasi belanja tidak langsung tahun 2017 sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai sebesar 2.000,57 milyar rupiah; serta belanja bagi hasil dan bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa 847,30 milyar rupiah; diikuti belanja bunga, subsidi dan hibah sebesar 816,87 milyar rupiah. Sisanya merupakan belanja tidak terduga sebesar 1,23 milyar.

Tabel 1.
Realisasi Pendapatan dan Pengeluaran
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2016-2018

Alokasi Anggaran (1)	2016		2017		2018 *)	
	Nilai (000 Rp) (2)	% (3)	Nilai (000 Rp) (4)	% (5)	Nilai (000 Rp) (6)	% (7)
A Pendapatan	4 624 674 545,94	100,00	6 066 826 853,96	100,00	6 431 896 764,30	100,00
1 Pendapatan Asli Daerah	1 964 148 975,80	42,47	2 134 010 519,50	35,18	2 320 938 900,00	36,08
2 Dana Perimbangan	2 576 754 985,11	55,72	3 866 663 233,17	63,73	4 023 235 864,30	62,55
3 Lain-lain Pendapatan yang Sah	83 770 585,03	1,81	66 153 101,29	1,09	87 722 000,00	1,36
B Belanja Daerah	4 504 037 258,75	100,00	5 759 818 392,40	100,00	6 642 459 403,77	100,00
1 Belanja Tidak Langsung	2 600 444 061,21	57,74	3 665 975 570,68	63,65	4 005 097 567,03	60,30
1.1 Belanja Pegawai	685 822 983,09	15,23	2 000 574 462,21	34,73	2 162 047 568,18	32,55
1.2 Belanja Bunga, Subsidi, Hibah	1 079 238 246,69	23,96	816 868 570,30	14,18	862 463 358,10	12,98
1.3 Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Belanja Bagi Hasil & Bantuan Keuangan	834 019 249,03	18,52	847 303 758,97	14,71	965 515 077,75	14,54
1.5 Belanja Tidak Terduga	1 363 582,40	0,03	1 228 779,20	0,02	15 071 563,00	0,23
2 Belanja Langsung	1 903 593 197,54	42,26	2 093 842 821,72	36,35	2 637 361 836,74	39,70
2.1 Belanja Pegawai	18 302 036,32	0,41	113 099 206,04	1,96	28 411 330,00	0,43
2.2 Belanja Barang dan Jasa	895 361 389,79	19,88	867 235 428,58	15,06	1 495 885 893,47	22,52
2.3 Belanja Modal	989 929 771,43	21,98	1 113 508 187,10	19,33	1 113 064 613,27	16,76

Sumber : pengolahan dokumen K-2 Kabupaten/Kota

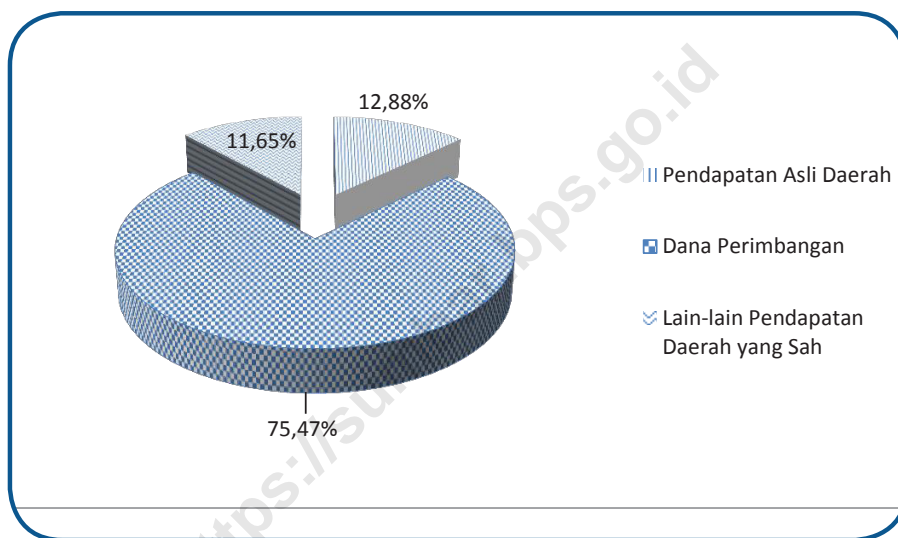
Catatan : *) data APBD

Alokasi belanja langsung didominasi untuk kebutuhan belanja modal, yaitu sebesar 1.113,51 miliar rupiah. Pengeluaran terbesar kedua digunakan untuk belanja barang dan jasa, yaitu sebesar 867,23 miliar rupiah. Pengeluaran untuk belanja pegawai hanya sebesar 113,10 miliar rupiah.

2. Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Total realisasi pendapatan di seluruh daerah tingkat kabupaten/kota se-Sumatera Barat tahun anggaran 2017 tercatat sebesar 19.649,73 miliar rupiah, meningkat 4,45 persen dibandingkan tahun 2016. Sebagian besar pendapatan kabupaten/kota bersumber dari dana perimbangan 14.829,84 milyar rupiah (75,47 persen), diikuti pendapatan asli daerah 2.530,12 (12,88 persen) dan lain-lain pendapatan daerah yang sah 2.289,76 milyar rupiah (11,65 persen).

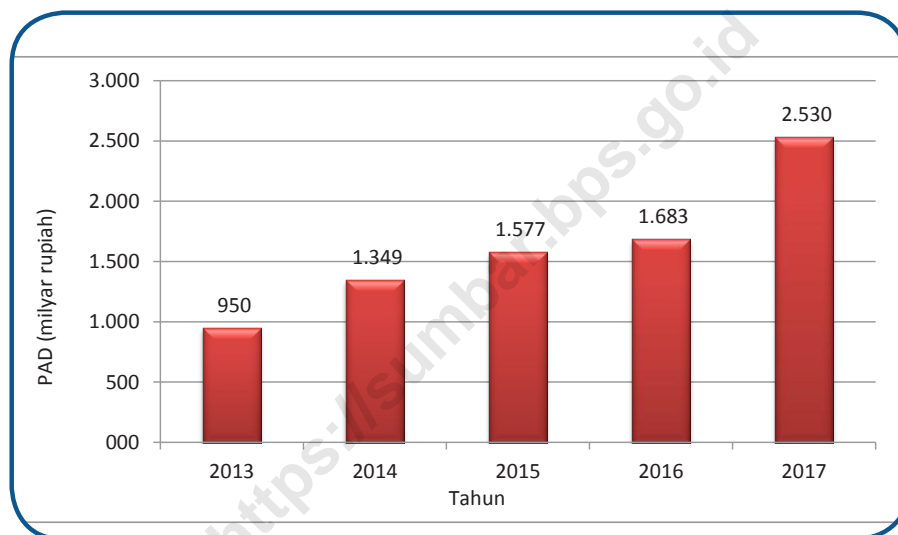
Gambar 1
Persentase Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Menurut Jenis Pendapatan Tahun 2017



Penerimaan daerah yang berasal dari PAD masih sangat rendah dari total pendapatan. Penerimaan PAD seharusnya dapat menjadi sumber pendapatan utama di daerah tersebut, karena pendapatan ini digali dari potensi daerah dan daerah mempunyai kewenangan penuh dalam memanfaatkan PAD ini sesuai kebutuhan dan prioritas daerah. Kondisi ini mencerminkan tingkat kemandirian daerah yang masih perlu ditingkatkan.

Dalam enam tahun terakhir, realisasi PAD pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Barat cenderung terus meningkat, tapi agak menurun pada target 2018. Peningkatan tertinggi PAD dalam kurun waktu tersebut, terjadi pada tahun 2017 (50,33 persen), sedangkan peningkatan terendah tercatat pada tahun 2016 (6,72 persen). Dan ditargetkan penerimaan PAD tahun 2018 sebesar 2.218,66 milyar turun sebesar 12,29 persen. Walaupun persentase dari total pendapatan daerah masih rendah, namun adanya peningkatan realisasi nilai PAD dari tahun ke tahun menunjukkan adanya kemajuan dalam pengelolaan sumber daya yang ada di daerah (Gambar 2).

Gambar 2
Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, 2013-2017 (Miliar Rupiah)



Catatan : data 2018 adalah data APBD

Sementara itu, pada sisi pengeluaran sebagian besar belanja pemerintah kabupaten/kota lebih banyak terserap untuk kebutuhan belanja langsung dibandingkan untuk kebutuhan belanja tidak langsung. Pada tahun 2017 Pemerintah kabupaten/kota telah mengeluarkan dana sebesar 19.415,15 miliar rupiah untuk belanja daerah, dengan realisasi sebesar 50,08 persen untuk belanja langsung dan 49,92 persen untuk belanja tidak langsung. Pemanfaatan belanja langsung senilai 9.723,42 miliar rupiah sebagian besar dialokasikan untuk belanja barang dan jasa sebesar 4.738,35 miliar rupiah (48,73 persen), dan untuk belanja modal sebesar 4.298,47 miliar rupiah (44,21 persen). Belanja pegawai hanya sebesar 686,61 miliar rupiah (7,06 persen), sebagaimana terlihat pada tabel 2.

Tabel 2
Realisasi Pendapatan dan Pengeluaran
Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat
Tahun 2016-2018

Alokasi Anggaran	2016		2017		2018 *)	
	Nilai (000 Rp)	%	Nilai (000 Rp)	%	Nilai (000 Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A Pendapatan	18 812 959 845,93	100,00	19 649 729 034,16	100,00	19 955 912 832,19	100,00
1 Pendapatan Asli Daerah	1 683 226 171,34	8,95	2 530 121 133,59	12,88	2 218 657 526,83	11,12
2 Dana Perimbangan	15 407 122 288,49	81,90	14 829 844 350,35	75,47	15 447 994 486,47	77,41
3 Lain-lain Pendapatan yang Sah	1 722 611 386,10	9,16	2 289 763 550,23	11,65	2 289 260 818,90	11,47
B Belanja Daerah	19 324 813 751,06	100,00	19 415 152 589,23	100,00	21 162 993 467,06	100,00
1 Belanja Tidak Langsung	10 702 837 811,34	55,38	9 691 728 204,44	49,92	11 068 249 170,57	52,30
1.1 Belanja Pegawai	9 121 106 799,32	47,20	7 772 862 924,86	40,04	8 832 163 518,69	41,73
1.2 Belanja Bunga, Subsidi, Hibah	238 027 608,41	1,23	243 216 192,51	1,25	315 228 005,88	1,49
1.3 Belanja Bantuan Sosial	9 902 264,40	0,05	19 732 632,50	0,10	40 621 303,12	0,19
1.4 Belanja Bagi Hasil & Bantuan Keuangan	1 318 914 651,33	6,82	1 642 842 272,16	8,46	1 823 987 501,86	8,62
1.5 Belanja Tidak Terduga	14 886 487,88	0,08	13 074 182,41	0,07	56 248 841,03	0,27
2 Belanja Langsung	8 621 975 939,72	44,62	9 723 424 384,80	50,08	10 094 744 296,49	47,70
2.1 Belanja Pegawai	574 059 128,89	2,97	686 605 970,64	3,54	615 109 057,58	2,91
2.2 Belanja Barang dan Jasa	3 832 412 534,35	19,83	4 738 346 936,17	24,41	5 009 982 521,76	23,67
2.3 Belanja Modal	4 215 504 276,48	21,81	4 298 471 477,98	22,14	4 469 652 717,15	21,12

Sumber: pengolahan dokumen K-2 Kabupaten/Kota

Catatan: *) data APBD

Pada tahun 2017, Kota Padang sebagai ibukota Provinsi Sumatera Barat mempunyai realisasi pendapatan paling besar di antara kabupaten/kota lainnya, yaitu sebesar 2.092,28 miliar rupiah. Realisasi pendapatan terbesar kedua adalah Kabupaten Pesisir Selatan yang diikuti oleh Kabupaten Padang Pariaman, masing-masing sebesar 1.513,81 miliar rupiah dan 1.388,64 milyar rupiah (Gambar 3).

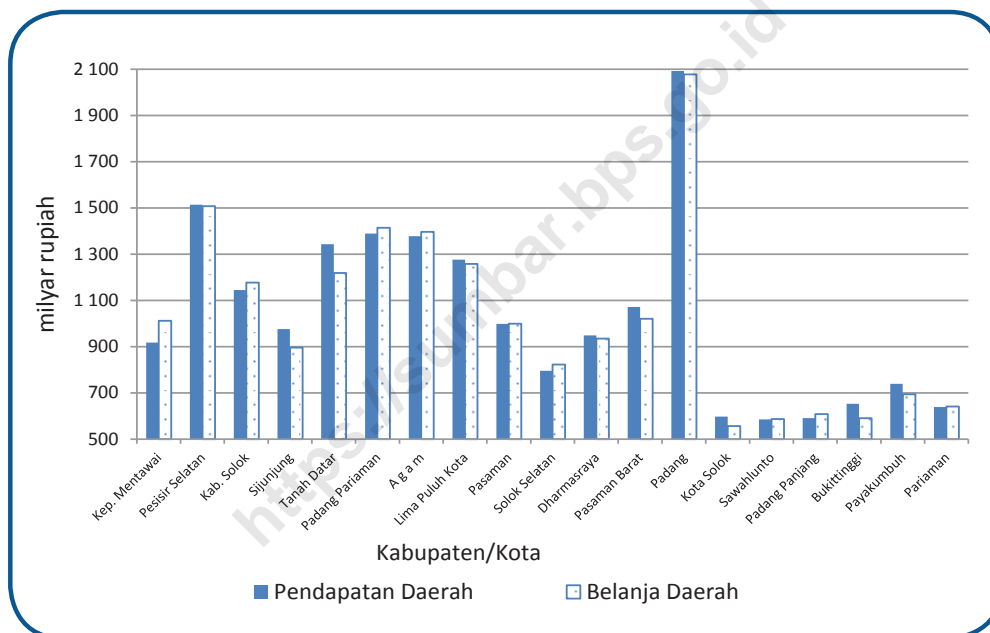
Sementara realisasi pendapatan paling rendah di antara kabupaten/kota lainnya adalah Kota Sawahlunto yakni sebesar 585,50 milyar rupiah. Realisasi pendapatan terendah kedua adalah Kota Padang Panjang yang diikuti oleh Kota Solok, yaitu masing-masing sebesar 591,06 miliar rupiah dan 597,24 miliar rupiah.

Umumnya pendapatan kabupaten/kota sebagian besar berasal dari dana perimbangan, terutama diperoleh dari Dana Alokasi Umum. Sementara pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah masing-masing kabupaten/kota masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan karena masing-masing kabupaten/kota belum bisa mengelola kemampuan daerah lebih maksimal.

Seiring dengan pendapatannya, belanja Kota Padang juga merupakan pengeluaran terbesar dibanding kabupaten/kota lain. Belanja terbesar kedua adalah Kabupaten Pesisir Selatan, diikuti oleh Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Agam.

Total belanja Pemerintah Kota Padang tahun 2017 adalah senilai 2.077,45 milyar rupiah. Sementara belanja Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 1.507,58 milyar rupiah. Sedangkan belanja Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Agam masing-masing sebesar 1.414,77 milyar rupiah dan 1.396,92 milyar rupiah.

Gambar 3.
Realisasi Pendapatan dan Realisasi Belanja
Pemerintah Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, Tahun 2017 (Milyar Rupiah)



Sumber : pengolahan dokumen K-2 Kabupaten/Kota

Kota Solok dan Kota Sawahlunto mempunyai realisasi belanja paling rendah di antara kabupaten/kota lainnya, yaitu masing-masing sebesar 556,79 milyar rupiah dan 587,08 milyar rupiah. Umumnya belanja kabupaten/kota sebagian besar dimanfaatkan untuk belanja tidak langsung dibandingkan untuk belanja langsung. Kebutuhan untuk belanja pegawai masih besar.

LAMPIRAN TABEL

<https://simbar.bps.go.id>

Tabel 1
Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah
Provinsi Sumatera Barat Menurut Komponen Penerimaan, 2017-2018
(Ribuan Rupiah)

No	Komponen Penerimaan	Nilai	
		2017	2018 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Pendapatan Daerah	6 066 826 853,96	6 431 896 764,30
1	Pendapatan Asli Daerah	2 134 010 519,50	2 320 938 900,00
1.1	Pajak Daerah	1 626 923 373,08	1 716 164 000,00
1.2	Retribusi Daerah	22 906 556,27	16 645 182,00
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	94 610 436,71	122 000 000,00
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	389 570 153,44	466 129 718,00
2	Dana Perimbangan	3 866 663 233,17	4 023 235 864,30
2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	152 435 926,31	183 380 833,30
2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	2 014 646 639,00	2 014 646 639,00
2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	1 699 580 667,86	1 825 208 392,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	66 153 101,29	87 722 000,00
3.1	Pendapatan Hibah	66 153 101,29	16 472 000,00
3.2	Dana Darurat	0,00	0,00
3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	71 250 000,00
3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
3.6	Lainnya	0,00	0,00
B	Penerimaan Pembiayaan Daerah	297 134 278,65	264 744 646,00
1.	Sisa Lebih Penghitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	297 134 278,65	264 744 646,00
2.	Penerimaan Pembiayaan Daerah Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Penerimaan Daerah		6 363 961 132,61	6 696 641 410,30

*) Data APBD

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota
se-Sumatera Barat Menurut Komponen Penerimaan, 2017-2018
(Ribuan Rupiah)

No	Komponen Penerimaan	Nilai	
		2017	2018 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Pendapatan Daerah	19 649 729 034,16	19 955 912 832,19
1	Pendapatan Asli Daerah	2 530 121 133,59	2 218 657 526,83
1.1	Pajak Daerah	605 805 609,80	721 222 169,50
1.2	Retribusi Daerah	163 149 452,41	242 185 818,76
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	158 508 631,19	211 937 717,52
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1 602 657 440,18	1 043 311 821,05
2	Dana Perimbangan	14 829 844 350,35	15 447 994 486,47
2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	350 479 053,51	388 359 817,47
2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	11 491 120 548,00	11 510 516 836,00
2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	2 988 244 748,84	3 549 117 833,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	2 289 763 550,23	2 289 260 818,90
3.1	Pendapatan Hibah	303 318 262,50	438 425 609,58
3.2	Dana Darurat	49 176 302,82	0,00
3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	710 604 109,87	731 852 253,32
3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	817 537 942,04	843 921 429,00
3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	111 369 722,00	158 474 740,00
3.6	Lainnya	297 757 211,00	116 586 787,00
B	Penerimaan Pembiayaan Daerah	1 606 151 884,11	1 369 759 777,88
1.	Sisa Lebih Penghitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	1 502 705 353,24	1 246 183 422,88
2.	Penerimaan Pembiayaan Daerah Lainnya	103 446 530,87	123 576 355,00
Jumlah Penerimaan Daerah		21 255 880 918,27	21 325 672 610,08

*) Data APBD

Tabel 1.1.1
Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai Menurut Komponen Penerimaan, 2017-2018
(Ribuan Rupiah)

No	Komponen Penerimaan	Nilai	
		2017	2018 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Pendapatan Daerah	917 793 849,30	969 706 800,03
1	Pendapatan Asli Daerah	68 477 676,60	79 851 330,12
1.1	Pajak Daerah	2 647 327,99	3 750 000,00
1.2	Retribusi Daerah	10 515 993,80	11 407 239,50
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15 177 376,11	40 000 000,00
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	40 136 978,70	24 694 090,62
2	Dana Perimbangan	731 385 235,58	798 255 970,92
2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	20 700 614,26	16 592 928,92
2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	591 339 690,00	610 939 918,00
2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	119 344 931,32	170 723 124,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	117 930 937,12	91 599 499,00
3.1	Pendapatan Hibah	0,00	15 489 800,00
3.2	Dana Darurat	0,00	0,00
3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	29 498 586,12	30 842 803,00
3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	46 812 952,00	0,00
3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
3.6	Lainnya	41 619 399,00	45 266 896,00
B	Penerimaan Pembiayaan Daerah	107 600 658,85	117 482 614,83
1.	Sisa Lebih Penghitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	107 600 658,85	117 482 614,83
2.	Penerimaan Pembiayaan Daerah Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Penerimaan Daerah		1 025 394 508,15	1 087 189 414,87

*) Data APBD

Tabel 1.1.2
Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Menurut Komponen Penerimaan, 2017-2018
(Ribuan Rupiah)

No	Komponen Penerimaan	Nilai	
		2017	2018 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Pendapatan Daerah	1 513 815 912,53	1 474 494 349,10
1	Pendapatan Asli Daerah	176 902 866,67	125 080 485,70
1.1	Pajak Daerah	18 504 280,67	20 998 585,70
1.2	Retribusi Daerah	3 676 999,25	14 911 000,00
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5 410 693,49	5 500 000,00
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	149 310 893,26	83 670 900,00
2	Dana Perimbangan	1 109 254 189,93	1 139 128 433,34
2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	22 703 709,36	22 756 352,34
2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	838 100 134,00	838 100 134,00
2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	248 450 346,58	278 271 947,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	227 658 855,93	210 285 430,06
3.1	Pendapatan Hibah	10 223 786,14	8 219 000,00
3.2	Dana Darurat	0,00	0,00
3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	56 813 212,79	47 600 678,06
3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	154 021 857,00	154 465 752,00
3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	6 600 000,00	0,00
3.6	Lainnya	0,00	0,00
B	Penerimaan Pembiayaan Daerah	114 480 306,61	131 537 385,00
1.	Sisa Lebih Penghitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	114 386 709,41	68 500 000,00
2.	Penerimaan Pembiayaan Daerah Lainnya	93 597,20	63 037 385,00
Jumlah Penerimaan Daerah		1 628 296 219,15	1 606 031 734,10

*) Data APBD

Tabel 1.1.3
Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah
Kabupaten Solok Menurut Komponen Penerimaan, 2017-2018
(Ribuan Rupiah)

No	Komponen Penerimaan	Nilai	
		2017	2018 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Pendapatan Daerah	1 144 553 785,05	1 139 958 421,81
1	Pendapatan Asli Daerah	113 269 815,42	71 710 967,81
1.1	Pajak Daerah	14 717 757,80	17 518 108,10
1.2	Retribusi Daerah	5 590 150,09	9 343 046,44
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6 839 378,88	7 539 330,06
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	86 122 528,65	37 310 483,21
2	Dana Perimbangan	911 897 537,82	956 834 682,00
2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	13 597 428,15	14 873 274,00
2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	710 962 915,00	710 962 915,00
2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	187 337 194,67	230 998 493,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	119 386 431,81	111 412 772,00
3.1	Pendapatan Hibah	10 121 263,64	3 000 000,00
3.2	Dana Darurat	0,00	0,00
3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	42 283 030,17	45 535 567,00
3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	64 082 138,00	62 877 205,00
3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	2 900 000,00	0,00
3.6	Lainnya	0,00	0,00
B	Penerimaan Pembiayaan Daerah	81 493 304,68	30 000 000,00
1.	Sisa Lebih Penghitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	81 459 582,18	30 000 000,00
2.	Penerimaan Pembiayaan Daerah Lainnya	33 722,50	0,00
Jumlah Penerimaan Daerah		1 226 047 089,73	1 169 958 421,81

*) Data APBD

Tabel 1.1.4
Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah
Kabupaten Sijunjung Menurut Komponen Penerimaan, 2017-2018
(Ribuan Rupiah)

No	Komponen Penerimaan	Nilai	
		2017	2018 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Pendapatan Daerah	975 949 626,00	909 559 817,19
1	Pendapatan Asli Daerah	107 915 721,00	73 319 762,19
1.1	Pajak Daerah	13 427 638,00	11 658 500,00
1.2	Retribusi Daerah	4 814 050,00	5 104 634,00
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12 081 946,00	14 255 000,00
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	77 592 087,00	42 301 628,19
2	Dana Perimbangan	710 605 073,00	714 838 901,00
2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	11 357 206,00	14 546 709,00
2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	548 573 107,00	548 573 107,00
2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	150 674 760,00	151 719 085,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	157 428 832,00	121 401 154,00
3.1	Pendapatan Hibah	19 460 000,00	0,00
3.2	Dana Darurat	0,00	0,00
3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	37 146 577,00	36 510 159,00
3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	0,00
3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	1 725 000,00	0,00
3.6	Lainnya	99 097 255,00	84 890 995,00
B	Penerimaan Pembiayaan Daerah	63 254 098,00	77 425 291,86
1.	Sisa Lebih Penghitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	57 032 806,00	72 925 291,86
2.	Penerimaan Pembiayaan Daerah Lainnya	6 221 292,00	4 500 000,00
Jumlah Penerimaan Daerah		1 039 203 724,00	986 985 109,05

*) Data APBD

Tabel 1.1.5
Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah
Kabupaten Tanah Datar Menurut Komponen Penerimaan, 2017-2018
(Ribuan Rupiah)

No	Komponen Penerimaan	Nilai	
		2017	2018 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Pendapatan Daerah	1 343 221 487,00	1 260 633 135,00
1	Pendapatan Asli Daerah	172 812 023,00	152 110 032,00
1.1	Pajak Daerah	16 523 395,00	17 894 893,00
1.2	Retribusi Daerah	6 867 932,00	9 822 643,00
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23 511 198,00	30 292 000,00
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	125 909 498,00	94 100 496,00
2	Dana Perimbangan	928 980 499,00	985 569 196,00
2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	16 512 932,00	16 769 622,00
2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	695 555 745,00	695 555 745,00
2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	216 911 822,00	273 243 829,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	241 428 965,00	122 953 907,00
3.1	Pendapatan Hibah	122 953 907,00	450 000,00
3.2	Dana Darurat	0,00	0,00
3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	42 275 286,00	39 954 612,00
3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	69 969 772,00	82 549 295,00
3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	6 230 000,00	0,00
3.6	Lainnya	0,00	0,00
B	Penerimaan Pembiayaan Daerah	81 292 776,00	73 743 614,00
1.	Sisa Lebih Penghitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	81 292 776,00	73 743 614,00
2.	Penerimaan Pembiayaan Daerah Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Penerimaan Daerah		1 424 514 263,00	1 334 376 749,00

*) Data APBD

Tabel 1.1.6
Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah
Kabupaten Padang Pariaman Menurut Komponen Penerimaan, 2017-2018
(Ribuan Rupiah)

No	Komponen Penerimaan	Nilai	
		2017	2018 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Pendapatan Daerah	1 388 638 247,01	1 450 194 377,38
1	Pendapatan Asli Daerah	141 310 805,69	117 735 858,38
1.1	Pajak Daerah	36.853.311,53	40 900 000,00
1.2	Retribusi Daerah	15.835.547,79	15 440 000,00
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.014.169,91	7 740 000,00
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	82.607.776,46	53 655 858,38
2	Dana Perimbangan	1 059 564 099,18	1 109 717 566,00
2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	12.500.475,38	14 144 579,00
2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	769.827.010,00	769 827 010,00
2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	277.236.613,80	325 745 977,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	187 763 342,14	222 740 953,00
3.1	Pendapatan Hibah	28.334.972,32	71 183 119,00
3.2	Dana Darurat	49.176.302,82	0,00
3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	52 449 990,00
3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	51.028.495,00	16 500 000,00
3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	58.865.722,00	81 807 844,00
3.6	Lainnya	357.850,00	800 000,00
B	Penerimaan Pembiayaan Daerah	65 988 090,77	18 000 000,00
1.	Sisa Lebih Penghitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	65.978.090,77	18 000 000,00
2.	Penerimaan Pembiayaan Daerah Lainnya	10 000,00	0,00
Jumlah Penerimaan Daerah		1 454 626 337,78	1 468 194 377,38

*) Data APBD

Tabel 1.1.7
Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah
Kabupaten Agam Menurut Komponen Penerimaan, 2017-2018
(Ribuan Rupiah)

No	Komponen Penerimaan	Nilai	
		2017	2018 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Pendapatan Daerah	1 377 484 419,00	1 419 303 049,00
1	Pendapatan Asli Daerah	161 539 091,00	106 081 198,00
1.1	Pajak Daerah	27 494 004,00	31 465 146,00
1.2	Retribusi Daerah	6 826 322,00	6 484 934,00
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8 618 278,00	8 618 278,00
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	118 600 487,00	59 512 840,00
2	Dana Perimbangan	1 078 038 916,00	1 117 516 113,00
2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	21 290 000,00	19 681 845,00
2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	813 474 914,00	813 474 914,00
2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	243 274 002,00	284 359 354,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	137 906 412,00	195 705 738,00
3.1	Pendapatan Hibah	6 146 641,00	60 607 400,00
3.2	Dana Darurat	0,00	0,00
3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	48 704 920,00	45 619 642,00
3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	78 272 851,00	89 478 696,00
3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	4 782 000,00	0,00
3.6	Lainnya	0,00	0,00
B	Penerimaan Pembiayaan Daerah	87 423 962,00	43 623 427,00
1.	Sisa Lebih Penghitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	87 423 962,00	43 623 427,00
2.	Penerimaan Pembiayaan Daerah Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Penerimaan Daerah		1 464 908 381,00	1 462 926 476,00

*) Data APBD

Tabel 1.1.8
Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Menurut Komponen Penerimaan, 2017-2018
(Ribuan Rupiah)

No	Komponen Penerimaan	Nilai	
		2017	2018 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Pendapatan Daerah	1 275 862 309,00	1 284 021 439,00
1	Pendapatan Asli Daerah	119 771 917,00	84 798 043,00
1.1	Pajak Daerah	17 667 233,00	23 500 000,00
1.2	Retribusi Daerah	4 495 398,00	6 415 690,00
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2 422 004,00	2 957 700,00
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	95 187 282,00	51 924 653,00
2	Dana Perimbangan	992 052 783,00	1 019 644 219,00
2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	18 777 470,00	18 197 930,00
2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	747 892 916,00	747 073 168,00
2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	225 382 397,00	254 373 121,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	164 037 609,00	179 579 177,00
3.1	Pendapatan Hibah	1 320 304,00	0,00
3.2	Dana Darurat	0,00	0,00
3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	43 072 067,00	38 289 711,00
3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	118 245 238,00	141 289 466,00
3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	1 400 000,00	0,00
3.6	Lainnya	0,00	0,00
B	Penerimaan Pembiayaan Daerah	57 899 350,00	52 412 582,00
1.	Sisa Lebih Penghitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0,00	49 412 582,00
2.	Penerimaan Pembiayaan Daerah Lainnya	57 899 350,00	3 000 000,00
Jumlah Penerimaan Daerah		1 333 761 659,00	1 336 434 021,00

*) Data APBD

Tabel 1.1.9
Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah
Kabupaten Pasaman Menurut Komponen Penerimaan, 2017-2018
(Ribuan Rupiah)

No	Komponen Penerimaan	Nilai	
		2017	2018 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Pendapatan Daerah	998 686 811,76	963 443 669,10
1	Pendapatan Asli Daerah	142 748 233,33	98 526 149,09
1.1	Pajak Daerah	8 925 097,79	8 251 110,99
1.2	Retribusi Daerah	5 719 195,79	4 959 716,25
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9 386 932,70	9 386 932,70
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	118 717 007,05	75 928 389,15
2	Dana Perimbangan	767 064 865,46	772 743 746,87
2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	12 904 511,77	14 480 105,87
2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	596 083 486,00	596 083 486,00
2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	158 076 867,69	162 180 155,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	88 873 712,97	92 173 773,14
3.1	Pendapatan Hibah	6 223 834,22	1 000 000,00
3.2	Dana Darurat	0,00	0,00
3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	38 449 067,75	35 594 617,14
3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	7 500 000,00	55 579 156,00
3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	750 000,00	0,00
3.6	Lainnya	35 950 811,00	0,00
B	Penerimaan Pembiayaan Daerah	83 632 823,88	39 715 822,06
1.	Sisa Lebih Penghitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	83 567 823,88	39 715 822,06
2.	Penerimaan Pembiayaan Daerah Lainnya	65 000,00	0,00
Jumlah Penerimaan Daerah		1 082 319 635,64	1 003 159 491,16

*) Data APBD

Tabel 1.1.10
Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah
Kabupaten Solok Selatan Menurut Komponen Penerimaan, 2017-2018
(Ribuan Rupiah)

No	Komponen Penerimaan	Nilai	
		2017	2018 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Pendapatan Daerah	795 912 780,98	782 113 583,00
1	Pendapatan Asli Daerah	75 588 033,10	23 848 000,00
1.1	Pajak Daerah	7 013 266,99	11 763 000,00
1.2	Retribusi Daerah	1 244 374,20	2 085 000,00
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1 984 359,88	2 500 000,00
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	65 346 032,03	7 500 000,00
2	Dana Perimbangan	641 966 526,86	641 010 076,00
2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	14 713 776,97	13 517 230,00
2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	480 406 179,00	480 406 179,00
2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	146 846 570,89	147 086 667,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	78 358 221,02	117 255 507,00
3.1	Pendapatan Hibah	2 550 069,67	45 377 874,00
3.2	Dana Darurat	0,00	0,00
3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	38 125 659,30	36 156 232,00
3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	35 632 492,04	35 721 401,00
3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	2 050 000,00	0,00
3.6	Lainnya	0,00	0,00
B	Penerimaan Pembiayaan Daerah	48 374 912,05	34 653 018,37
1.	Sisa Lebih Penghitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	48 374 912,05	34 653 018,37
2.	Penerimaan Pembiayaan Daerah Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Penerimaan Daerah		844 287 693,03	816 766 601,37

*) Data APBD

Tabel 1.1.11
Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah
Kabupaten Dharmasraya Menurut Komponen Penerimaan, 2017-2018
(Ribuan Rupiah)

No	Komponen Penerimaan	Nilai	
		2017	2018 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Pendapatan Daerah	949 023 480,86	896 502 300,65
1	Pendapatan Asli Daerah	98 937 393,39	80 085 859,65
1.1	Pajak Daerah	14 933 091,58	18 669 577,92
1.2	Retribusi Daerah	4 186 557,03	5 941 998,32
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3 834 414,13	5 144 283,41
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	75 983 330,65	50 330 000,00
2	Dana Perimbangan	696 906 890,93	714 426 147,00
2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	13 255 794,54	18 537 327,00
2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	501 682 277,00	502 298 085,00
2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	181 968 819,39	193 590 735,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	153 179 196,54	101 990 294,00
3.1	Pendapatan Hibah	18 084 129,96	2 200 000,00
3.2	Dana Darurat	0,00	0,00
3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	37 301 045,58	39 041 263,00
3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	96 844 021,00	60 749 031,00
3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	950 000,00	0,00
3.6	Lainnya	0,00	0,00
B	Penerimaan Pembiayaan Daerah	21 931 305,58	34 000 000,00
1.	Sisa Lebih Penghitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	21 931 305,58	34 000 000,00
2.	Penerimaan Pembiayaan Daerah Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Penerimaan Daerah		970 954 786,44	930 502 300,65

*) Data APBD

Tabel 1.1.12
Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah
Kabupaten Pasaman Barat Menurut Komponen Penerimaan, 2017-2018
(Ribuan Rupiah)

No	Komponen Penerimaan	Nilai	
		2017	2018 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Pendapatan Daerah	1 071 634 148,01	1 187 466 878,72
1	Pendapatan Asli Daerah	158 920 863,87	102 623 195,68
1.1	Pajak Daerah	17 966 272,85	20 816 261,76
1.2	Retribusi Daerah	6 734 460,35	9 538 890,00
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2 551 764,92	2 576 764,92
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	131 668 365,75	69 691 279,00
2	Dana Perimbangan	835 170 390,50	900 006 930,34
2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	22 908 809,19	23 502 476,34
2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	644 333 727,00	644 333 727,00
2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	167 927 854,31	232 170 727,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	77 542 893,64	184 836 752,70
3.1	Pendapatan Hibah	2 955 000,00	65 171 596,58
3.2	Dana Darurat	0,00	0,00
3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	47 314 510,64	48 203 729,12
3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	25 173 383,00	71 461 427,00
3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	2 100 000,00	0,00
3.6	Lainnya	0,00	0,00
B	Penerimaan Pembiayaan Daerah	140 905 722,27	125 000 000,00
1.	Sisa Lebih Penghitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	140 905 722,27	125 000 000,00
2.	Penerimaan Pembiayaan Daerah Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Penerimaan Daerah		1 212 539 870,28	1 312 466 878,72

*) Data APBD

Tabel 1.1.13
Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah
Kota Padang Menurut Komponen Penerimaan, 2017-2018
(Ribuan Rupiah)

No	Komponen Penerimaan	Nilai	
		2017	2018 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Pendapatan Daerah	2 092 277 707,12	2 327 874 779,50
1	Pendapatan Asli Daerah	548 653 179,27	601 248 595,50
1.1	Pajak Daerah	327 916 583,33	400 911 615,20
1.2	Retribusi Daerah	35 291 295,60	69 902 387,18
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12 643 528,97	18 718 500,00
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	172 801 771,37	111 716 093,12
2	Dana Perimbangan	1 360 290 810,17	1 471 197 651,00
2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	66 174 694,05	86 051 392,00
2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 100 370 559,00	1 100 370 559,00
2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	193 745 557,12	284 775 700,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	183 333 717,68	255 428 533,00
3.1	Pendapatan Hibah	5 417 949,84	125 446 200,00
3.2	Dana Darurat	0,00	0,00
3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	111 146 247,84	101 732 333,00
3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	0,00
3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	14 017 000,00	28 250 000,00
3.6	Lainnya	52 752 520,00	0,00
B	Penerimaan Pembiayaan Daerah	141 868 478,29	100 508 746,10
1.	Sisa Lebih Penghitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	116 180 840,50	100 508 746,10
2.	Penerimaan Pembiayaan Daerah Lainnya	25 687 637,79	0,00
Jumlah Penerimaan Daerah		2 234 146 185,41	2 428 383 525,60

*) Data APBD

Tabel 1.1.14
Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah
Kota Solok Menurut Komponen Penerimaan, 2017-2018
(Ribuan Rupiah)

No	Komponen Penerimaan	Nilai	
		2017	2018 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Pendapatan Daerah	597 241 847,00	581 106 973,00
1	Pendapatan Asli Daerah	41 852 774,00	49 000 000,00
1.1	Pajak Daerah	8 338 597,00	7 982 926,83
1.2	Retribusi Daerah	6 190 179,00	9 025 550,18
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9 975 414,00	10 800 000,00
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	17 348 584,00	21 191 522,99
2	Dana Perimbangan	472 503 110,00	491 619 059,00
2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	12 689 036,00	14 589 932,00
2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	398 106 262,00	398 106 262,00
2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	61 707 812,00	78 922 865,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	82 885 963,00	40 487 914,00
3.1	Pendapatan Hibah	13 235 098,00	10 962 400,00
3.2	Dana Darurat	0,00	0,00
3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	22 196 122,00	19 705 514,00
3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	47 454 743,00	9 500 000,00
3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	320 000,00
3.6	Lainnya	0,00	0,00
B	Penerimaan Pembiayaan Daerah	130 890 066,45	142 728 451,60
1.	Sisa Lebih Penghitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	130 815 066,45	142 653 451,60
2.	Penerimaan Pembiayaan Daerah Lainnya	75 000,00	75 000,00
Jumlah Penerimaan Daerah		728 131 913,45	723 835 424,60

*) Data APBD

Tabel 1.1.15
Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah
Kota Sawahlunto Menurut Komponen Penerimaan, 2017-2018
(Ribuan Rupiah)

No	Komponen Penerimaan	Nilai	
		2017	2018 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Pendapatan Daerah	585 505 104,00	613 224 124,00
1	Pendapatan Asli Daerah	63 082 759,00	65 580 287,00
1.1	Pajak Daerah	5 337 144,00	5 749 853,00
1.2	Retribusi Daerah	3 954 649,00	4 147 131,00
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10 290 929,00	12 635 000,00
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	43 500 037,00	43 048 303,00
2	Dana Perimbangan	467 157 187,00	475 466 756,00
2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	16 164 696,00	18 294 627,00
2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	375 131 128,00	375 131 128,00
2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	75 861 363,00	82 041 001,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	55 265 158,00	72 177 081,00
3.1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00
3.2	Dana Darurat	0,00	0,00
3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	22 184 455,00	21 165 289,00
3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	7 500 000,00	27 500 000,00
3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	1 750 000,00	0,00
3.6	Lainnya	23 830 703,00	23 511 792,00
B	Penerimaan Pembiayaan Daerah	15 830 744,00	56 643 116,00
1.	Sisa Lebih Penghitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	15 638 882,00	43 983 227,00
2.	Penerimaan Pembiayaan Daerah Lainnya	191 862,00	12 659 889,00
Jumlah Penerimaan Daerah		601 335 848,00	669 867 240,00

*) Data APBD

Tabel 1.1.16
Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah
Kota Padang Panjang Menurut Komponen Penerimaan, 2017-2018
(Ribuan Rupiah)

No	Komponen Penerimaan	Nilai	
		2017	2018 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Pendapatan Daerah	591 062 889,00	627 739 222,00
1	Pendapatan Asli Daerah	88 837 034,00	140 045 000,00
1.1	Pajak Daerah	6 906 484,00	7 925 000,00
1.2	Retribusi Daerah	4 134 304,00	5 986 000,00
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7 693 433,00	12 000 000,00
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	70 102 813,00	114 134 000,00
2	Dana Perimbangan	439 519 041,00	454 313 523,00
2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	10 974 338,00	11 314 701,00
2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	375 436 356,00	375 436 356,00
2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	53 108 347,00	67 562 466,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	62 706 814,00	33 380 699,00
3.1	Pendapatan Hibah	42 836 368,00	0,00
3.2	Dana Darurat	0,00	0,00
3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	19 470 446,00	17 996 699,00
3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	8 000 000,00
3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	400 000,00	0,00
3.6	Lainnya	0,00	7 384 000,00
B	Penerimaan Pembiayaan Daerah	145 651 338,00	59 800 000,00
1.	Sisa Lebih Penghitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	145 651 338,00	59 800 000,00
2.	Penerimaan Pembiayaan Daerah Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Penerimaan Daerah		736 714 227,00	687 539 222,00

*) Data APBD

Tabel 1.1.17
 Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah
 Kota Bukittinggi Menurut Komponen Penerimaan, 2017-2018
 (Ribuan Rupiah)

No	Komponen Penerimaan	Nilai	
		2017	2018 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Pendapatan Daerah	653 021 577,19	697 464 192,00
1	Pendapatan Asli Daerah	102 022 621,33	99 988 280,00
1.1	Pajak Daerah	38 282 140,33	46 068 135,00
1.2	Retribusi Daerah	26 976 141,32	37 216 489,00
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4 953 910,64	3 448 620,00
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	31 810 429,04	13 255 036,00
2	Dana Perimbangan	516 228 868,60	534 339 254,00
2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	15 520 149,46	16 864 247,00
2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	450 905 882,00	450 905 882,00
2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	49 802 837,14	66 569 125,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	34 770 087,26	63 136 658,00
3.1	Pendapatan Hibah	0,00	12 001 220,00
3.2	Dana Darurat	0,00	0,00
3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	26 270 087,26	22 885 438,00
3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	7 500 000,00	28 250 000,00
3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	1 000 000,00	0,00
3.6	Lainnya	0,00	0,00
B	Penerimaan Pembiayaan Daerah	79 573 559,56	115 524 764,00
1.	Sisa Lebih Penghitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	79 573 559,56	75 220 683,00
2.	Penerimaan Pembiayaan Daerah Lainnya	0,00	40 304 081,00
Jumlah Penerimaan Daerah		732 595 136,75	812 988 956,00

*) Data APBD

Tabel 1.1.18
Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah
Kota Payakumbuh Menurut Komponen Penerimaan, 2017-2018
(Ribuan Rupiah)

No	Komponen Penerimaan	Nilai	
		2017	2018 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Pendapatan Daerah	739 010 301,39	723 592 513,71
1	Pendapatan Asli Daerah	116 596 479,80	107 516 370,71
1.1	Pajak Daerah	14 047 192,75	16 572 700,00
1.2	Retribusi Daerah	6 726 133,03	7 513 699,89
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8 828 124,90	11 534 534,43
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	86 995 029,12	71 895 436,39
2	Dana Perimbangan	596 081 338,11	577 192 002,00
2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	13 378 402,33	17 647 721,00
2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	437 696 934,00	437 696 934,00
2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	145 006 001,77	121 847 347,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	26 332 483,48	38 884 141,00
3.1	Pendapatan Hibah	816 000,00	17 317 000,00
3.2	Dana Darurat	0,00	0,00
3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	25 516 483,48	21 567 141,00
3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	0,00
3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
3.6	Lainnya	0,00	0,00
B	Penerimaan Pembiayaan Daerah	60 870 393,44	44 451 049,07
1.	Sisa Lebih Penghitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	47 701 324,06	44 451 049,07
2.	Penerimaan Pembiayaan Daerah Lainnya	13 169 069,38	0,00
Jumlah Penerimaan Daerah		799 880 694,83	768 043 562,78

*) Data APBD

Tabel 1.1.19
Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah
Kota Pariaman Menurut Komponen Penerimaan, 2017-2018
(Ribuan Rupiah)

No	Komponen Penerimaan	Nilai	
		2017	2018 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Pendapatan Daerah	639 032 751,95	647 513 208,00
1	Pendapatan Asli Daerah	30 881 846,11	39 508 112,00
1.1	Pajak Daerah	8 304 791,19	8 826 756,00
1.2	Retribusi Daerah	3 369 770,16	6 939 770,00
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6 290 774,66	6 290 774,00
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	12 916 510,10	17 450 812,00
2	Dana Perimbangan	515 176 988,20	574 174 260,00
2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	14 355 010,05	15 996 818,00
2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	415 241 327,00	415 241 327,00
2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	85 580 651,15	142 936 115,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	92 973 917,64	33 830 836,00
3.1	Pendapatan Hibah	12.638.938,71	0,00
3.2	Dana Darurat	0,00	0,00
3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	22 836 305,93	31 000 836,00
3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	7 500 000,00	0,00
3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	5 850 000,00	2 830 000,00
3.6	Lainnya	44 148 673,00	0,00
B	Penerimaan Pembiayaan Daerah	77 189 993,67	72 509 896,00
1.	Sisa Lebih Penghitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	77 189 993,67	72 509 896,00
2.	Penerimaan Pembiayaan Daerah Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Penerimaan Daerah		716 222 745,62	720 023 104,00

*) Data APBD

Tabel 2
Realisasi Pendapatan Daerah
Menurut Kabupaten/Kota, 2017-2018
(Ribuan Rupiah)

No	Kabupaten/Kota	Nilai	
		2017	2018 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
Kabupaten			
1	Kepulauan Mentawai	917 793 849,30	969 706 800,03
2	Pesisir Selatan	1 513 815 912,53	1 474 494 349,10
3	Solok	1 144 553 785,05	1 139 958 421,81
4	Sijunjung	975 949 626,00	909 559 817,19
5	Tanah Datar	1 343 221 487,00	1 260 633 135,00
6	Padang Pariaman	1 388 638 247,01	1 450 194 377,38
7	Agam	1 377 484 419,00	1 419 303 049,00
8	Limapuluh Kota	1 275 862 309,00	1 284 021 439,00
9	Pasaman	998 686 811,76	963 443 669,10
10	Solok Selatan	795 912 780,98	782 113 583,00
11	Dharmasraya	949 023 480,86	896 502 300,65
12	Pasaman Barat	1 071 634 148,01	1 187 466 878,72
Kota			
13	Padang	2 092 277 707,12	2 327 874 779,50
14	Solok	597 241 847,00	581 106 973,00
15	Sawahlunto	585 505 104,00	613 224 124,00
16	Padang Panjang	591 062 889,00	627 739 222,00
17	Bukittinggi	653 021 577,19	697 464 192,00
18	Payakumbuh	739 010 301,39	723 592 513,71
19	Pariaman	639 032 751,95	647 513 208,00
Sumatera Barat		19 649 729 034,16	19 955 912 832,19

*) Data APBD

Tabel 2.1
Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Menurut Kabupaten/Kota, 2017-2018
(Ribuan Rupiah)

No	Kabupaten/Kota	Nilai	
		2017	2018 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
Kabupaten			
1	Kepulauan Mentawai	68 477 676,60	79 851 330,12
2	Pesisir Selatan	176 902 866,67	125 080 485,70
3	Solok	113 269 815,42	71 710 967,81
4	Sijunjung	107 915 721,00	73 319 762,19
5	Tanah Datar	172 812 023,00	152 110 032,00
6	Padang Pariaman	141 310 805,69	117 735 858,38
7	Agam	161 539 091,00	106 081 198,00
8	Limapuluh Kota	119 771 917,00	84 798 043,00
9	Pasaman	142 748 233,33	98 526 149,09
10	Solok Selatan	75 588 033,10	23 848 000,00
11	Dharmasraya	98 937 393,39	80 085 859,65
12	Pasaman Barat	158 920 863,87	102 623 195,68
Kota			
13	Padang	548 653 179,27	601 248 595,50
14	Solok	41 852 774,00	49 000 000,00
15	Sawahlunto	63 082 759,00	65 580 287,00
16	Padang Panjang	88 837 034,00	140 045 000,00
17	Bukittinggi	102 022 621,33	99 988 280,00
18	Payakumbuh	116 596 479,80	107 516 370,71
19	Pariaman	30 881 846,11	39 508 112,00
Sumatera Barat		2 530 121 133,59	2 218 657 526,83

*) Data APBD

Tabel 2.1.1
Realisasi Pajak Daerah
Menurut Kabupaten/Kota, 2017-2018
(Ribuan Rupiah)

No	Kabupaten/Kota	Nilai	
		2017	2018 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
Kabupaten			
1	Kepulauan Mentawai	2 647 327,99	3 750 000,00
2	Pesisir Selatan	18 504 280,67	20 998 585,70
3	Solok	14 717 757,80	17 518 108,10
4	Sijunjung	13 427 638,00	11 658 500,00
5	Tanah Datar	16 523 395,00	17 894 893,00
6	Padang Pariaman	36 853 311,53	40 900 000,00
7	Agam	27 494 004,00	31 465 146,00
8	Limapuluh Kota	17 667 233,00	23 500 000,00
9	Pasaman	8 925 097,79	8 251 110,99
10	Solok Selatan	7 013 266,99	11 763 000,00
11	Dharmasraya	14 933 091,58	18 669 577,92
12	Pasaman Barat	17 966 272,85	20 816 261,76
Kota			
13	Padang	327 916 583,33	400 911 615,20
14	Solok	8 338 597,00	7 982 926,83
15	Sawahlunto	5 337 144,00	5 749 853,00
16	Padang Panjang	6 906 484,00	7 925 000,00
17	Bukittinggi	38 282 140,33	46 068 135,00
18	Payakumbuh	14 047 192,75	16 572 700,00
19	Pariaman	8 304 791,19	8 826 756,00
Sumatera Barat		605 805 609,80	721 222 169,50

*) Data APBD

Tabel 2.1.2
Realisasi Retribusi Daerah
Menurut Kabupaten/Kota, 2017-2018
(Ribuan Rupiah)

No	Kabupaten/Kota	Nilai	
		2017	2018 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
Kabupaten			
1	Kepulauan Mentawai	10 515 993,80	11 407 239,50
2	Pesisir Selatan	3 676 999,25	14 911 000,00
3	Solok	5 590 150,09	9 343 046,44
4	Sijunjung	4 814 050,00	5 104 634,00
5	Tanah Datar	6 867 932,00	9 822 643,00
6	Padang Pariaman	15 835 547,79	15 440 000,00
7	Agam	6 826 322,00	6 484 934,00
8	Limapuluh Kota	4 495 398,00	6 415 690,00
9	Pasaman	5 719 195,79	4 959 716,25
10	Solok Selatan	1 244 374,20	2 085 000,00
11	Dharmasraya	4 186 557,03	5 941 998,32
12	Pasaman Barat	6 734 460,35	9 538 890,00
Kota			
13	Padang	35 291 295,60	69 902 387,18
14	Solok	6 190 179,00	9 025 550,18
15	Sawahlunto	3 954 649,00	4 147 131,00
16	Padang Panjang	4 134 304,00	5 986 000,00
17	Bukittinggi	26 976 141,32	37 216 489,00
18	Payakumbuh	6 726 133,03	7 513 699,89
19	Pariaman	3 369 770,16	6 939 770,00
Sumatera Barat		163 149 452,41	242 185 818,76

*) Data APBD

Tabel 2.1.3
Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Menurut Kabupaten/Kota, 2017-2018
(Ribuan Rupiah)

No	Kabupaten/Kota	Nilai	
		2017	2018 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
Kabupaten			
1	Kepulauan Mentawai	15 177 376,11	40 000 000,00
2	Pesisir Selatan	5 410 693,49	5 500 000,00
3	Solok	6 839 378,88	7 539 330,06
4	Sijunjung	12 081 946,00	14 255 000,00
5	Tanah Datar	23 511 198,00	30 292 000,00
6	Padang Pariaman	6 014 169,91	7 740 000,00
7	Agam	8 618 278,00	8 618 278,00
8	Limapuluh Kota	2 422 004,00	2 957 700,00
9	Pasaman	9 386 932,70	9 386 932,70
10	Solok Selatan	1 984 359,88	2 500 000,00
11	Dharmasraya	3 834 414,13	5 144 283,41
12	Pasaman Barat	2 551 764,92	2 576 764,92
Kota			
13	Padang	12 643 528,97	18 718 500,00
14	Solok	9 975 414,00	10 800 000,00
15	Sawahlunto	10 290 929,00	12 635 000,00
16	Padang Panjang	7 693 433,00	12 000 000,00
17	Bukittinggi	4 953 910,64	3 448 620,00
18	Payakumbuh	8 828 124,90	11 534 534,43
19	Pariaman	6 290 774,66	6 290 774,00
Sumatera Barat		158 508 631,19	211 937 717,52

*) Data APBD

Tabel 2.1.4
Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Menurut Kabupaten/Kota, 2017-2018
(Ribuan Rupiah)

No	Kabupaten/Kota	Nilai	
		2017	2018 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
Kabupaten			
1	Kepulauan Mentawai	40 136 978,70	24 694 090,62
2	Pesisir Selatan	149 310 893,26	83 670 900,00
3	Solok	86 122 528,65	37 310 483,21
4	Sijunjung	77 592 087,00	42 301 628,19
5	Tanah Datar	125 909 498,00	94 100 496,00
6	Padang Pariaman	82 607 776,46	53 655 858,38
7	Agam	118 600 487,00	59 512 840,00
8	Limapuluh Kota	95 187 282,00	51 924 653,00
9	Pasaman	118 717 007,05	75 928 389,15
10	Solok Selatan	65 346 032,03	7 500 000,00
11	Dharmasraya	75 983 330,65	50 330 000,00
12	Pasaman Barat	131 668 365,75	69 691 279,00
Kota			
13	Padang	172 801 771,37	111 716 093,12
14	Solok	17 348 584,00	21 191 522,99
15	Sawahlunto	43 500 037,00	43 048 303,00
16	Padang Panjang	70 102 813,00	114 134 000,00
17	Bukittinggi	31 810 429,04	13 255 036,00
18	Payakumbuh	86 995 029,12	71 895 436,39
19	Pariaman	12 916 510,10	17 450 812,00
Sumatera Barat		1 602 657 440,18	1 043 311 821,05

*) Data APBD

Tabel 2.2
Realisasi Dana Perimbangan
Menurut Kabupaten/Kota, 2017-2018
(Ribuan Rupiah)

No	Kabupaten/Kota	Nilai	
		2017	2018 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
Kabupaten			
1	Kepulauan Mentawai	731 385 235,58	798 255 970,92
2	Pesisir Selatan	1 109 254 189,93	1 139 128 433,34
3	Solok	911 897 537,82	956 834 682,00
4	Sijunjung	710 605 073,00	714 838 901,00
5	Tanah Datar	928 980 499,00	985 569 196,00
6	Padang Pariaman	1 059 564 099,18	1 109 717 566,00
7	Agam	1 078 038 916,00	1 117 516 113,00
8	Limapuluh Kota	992 052 783,00	1 019 644 219,00
9	Pasaman	767 064 865,46	772 743 746,87
10	Solok Selatan	641 966 526,86	641 010 076,00
11	Dharmasraya	696 906 890,93	714 426 147,00
12	Pasaman Barat	835 170 390,50	900 006 930,34
Kota			
13	Padang	1 360 290 810,17	1 471 197 651,00
14	Solok	472 503 110,00	491 619 059,00
15	Sawahlunto	467 157 187,00	475 466 756,00
16	Padang Panjang	439 519 041,00	454 313 523,00
17	Bukittinggi	516 228 868,60	534 339 254,00
18	Payakumbuh	596 081 338,11	577 192 002,00
19	Pariaman	515 176 988,20	574 174 260,00
Sumatera Barat		14 829 844 350,35	15 447 994 486,47

*) Data APBD

Tabel 2.2.1
 Realisasi Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
 Menurut Kabupaten/Kota, 2017-2018
 (Ribuan Rupiah)

No	Kabupaten/Kota	Nilai	
		2017	2018 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
Kabupaten			
1	Kepulauan Mentawai	20 700 614,26	16 592 928,92
2	Pesisir Selatan	22 703 709,36	22 756 352,34
3	Solok	13 597 428,15	14 873 274,00
4	Sijunjung	11 357 206,00	14 546 709,00
5	Tanah Datar	16 512 932,00	16 769 622,00
6	Padang Pariaman	12 500 475,38	14 144 579,00
7	Agam	21 290 000,00	19 681 845,00
8	Limapuluh Kota	18 777 470,00	18 197 930,00
9	Pasaman	12 904 511,77	14 480 105,87
10	Solok Selatan	14 713 776,97	13 517 230,00
11	Dharmasraya	13 255 794,54	18 537 327,00
12	Pasaman Barat	22 908 809,19	23 502 476,34
Kota			
13	Padang	66 174 694,05	86 051 392,00
14	Solok	12 689 036,00	14 589 932,00
15	Sawahlunto	16 164 696,00	18 294 627,00
16	Padang Panjang	10 974 338,00	11 314 701,00
17	Bukittinggi	15 520 149,46	16 864 247,00
18	Payakumbuh	13 378 402,33	17 647 721,00
19	Pariaman	14 355 010,05	15 996 818,00
Sumatera Barat		350 479 053,51	388 359 817,47

*) Data APBD

Tabel 2.2.2
Realisasi Dana Alokasi Umum
Menurut Kabupaten/Kota, 2017-2018
(Ribuan Rupiah)

No	Kabupaten/Kota	Nilai	
		2017	2018 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
Kabupaten			
1	Kepulauan Mentawai	591 339 690,00	610 939 918,00
2	Pesisir Selatan	838 100 134,00	838 100 134,00
3	Solok	710 962 915,00	710 962 915,00
4	Sijunjung	548 573 107,00	548 573 107,00
5	Tanah Datar	695 555 745,00	695 555 745,00
6	Padang Pariaman	769 827 010,00	769 827 010,00
7	Agam	813 474 914,00	813 474 914,00
8	Limapuluh Kota	747 892 916,00	747 073 168,00
9	Pasaman	596 083 486,00	596 083 486,00
10	Solok Selatan	480 406 179,00	480 406 179,00
11	Dharmasraya	501 682 277,00	502 298 085,00
12	Pasaman Barat	644 333 727,00	644 333 727,00
Kota			
13	Padang	1 100 370 559,00	1 100 370 559,00
14	Solok	398 106 262,00	398 106 262,00
15	Sawahlunto	375 131 128,00	375 131 128,00
16	Padang Panjang	375 436 356,00	375 436 356,00
17	Bukittinggi	450 905 882,00	450 905 882,00
18	Payakumbuh	437 696 934,00	437 696 934,00
19	Pariaman	415 241 327,00	415 241 327,00
Sumatera Barat		11 491 120 548,00	11 510 516 836,00

*) Data APBD

Tabel 2.2.3
Realisasi Dana Alokasi Khusus
Menurut Kabupaten/Kota, 2017-2018
(Ribuan Rupiah)

No	Kabupaten/Kota	Nilai	
		2017	2018 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
Kabupaten			
1	Kepulauan Mentawai	119 344 931,32	170 723 124,00
2	Pesisir Selatan	248 450 346,58	278 271 947,00
3	Solok	187 337 194,67	230 998 493,00
4	Sijunjung	150 674 760,00	151 719 085,00
5	Tanah Datar	216 911 822,00	273 243 829,00
6	Padang Pariaman	277 236 613,80	325 745 977,00
7	Agam	243 274 002,00	284 359 354,00
8	Limapuluh Kota	225 382 397,00	254 373 121,00
9	Pasaman	158 076 867,69	162 180 155,00
10	Solok Selatan	146 846 570,89	147 086 667,00
11	Dharmasraya	181 968 819,39	193 590 735,00
12	Pasaman Barat	167 927 854,31	232 170 727,00
Kota			
13	Padang	193 745 557,12	284 775 700,00
14	Solok	61 707 812,00	78 922 865,00
15	Sawahlunto	75 861 363,00	82 041 001,00
16	Padang Panjang	53 108 347,00	67 562 466,00
17	Bukittinggi	49 802 837,14	66 569 125,00
18	Payakumbuh	145 006 001,77	121 847 347,00
19	Pariaman	85 580 651,15	142 936 115,00
Sumatera Barat		2 988 244 748,84	3 549 117 833,00

*) Data APBD

Tabel 2.3
 Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
 Menurut Kabupaten/Kota, 2017-2018
 (Ribuan Rupiah)

No	Kabupaten/Kota	Nilai	
		2017	2018 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
Kabupaten			
1	Kepulauan Mentawai	117 930 937,12	91 599 499,00
2	Pesisir Selatan	227 658 855,93	210 285 430,06
3	Solok	119 386 431,81	111 412 772,00
4	Sijunjung	157 428 832,00	121 401 154,00
5	Tanah Datar	241 428 965,00	122 953 907,00
6	Padang Pariaman	187 763 342,14	222 740 953,00
7	Agam	137 906 412,00	195 705 738,00
8	Limapuluh Kota	164 037 609,00	179 579 177,00
9	Pasaman	88 873 712,97	92 173 773,14
10	Solok Selatan	78 358 221,02	117 255 507,00
11	Dharmasraya	153 179 196,54	101 990 294,00
12	Pasaman Barat	77 542 893,64	184 836 752,70
Kota			
13	Padang	183 333 717,68	255 428 533,00
14	Solok	82 885 963,00	40 487 914,00
15	Sawahlunto	55 265 158,00	72 177 081,00
16	Padang Panjang	62 706 814,00	33 380 699,00
17	Bukittinggi	34 770 087,26	63 136 658,00
18	Payakumbuh	26 332 483,48	38 884 141,00
19	Pariaman	92 973 917,64	33 830 836,00
Sumatera Barat		2 289 763 550,23	2 289 260 818,90

*) Data APBD

Tabel 2.4
Realisasi Penerimaan Pembiayaan
Menurut Kabupaten/Kota, 2017-2018
(Ribuan Rupiah)

No	Kabupaten/Kota	Nilai	
		2017	2018 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
Kabupaten			
1	Kepulauan Mentawai	107 600 658,85	117 482 614,83
2	Pesisir Selatan	114 480 306,61	131 537 385,00
3	Solok	81 493 304,68	30 000 000,00
4	Sijunjung	63 254 098,00	77 425 291,86
5	Tanah Datar	81 292 776,00	73 743 614,00
6	Padang Pariaman	65 988 090,77	18 000 000,00
7	Agam	87 423 962,00	43 623 427,00
8	Limapuluh Kota	57 899 350,00	52 412 582,00
9	Pasaman	83 632 823,88	39 715 822,06
10	Solok Selatan	48 374 912,05	34 653 018,37
11	Dharmasraya	21 931 305,58	34 000 000,00
12	Pasaman Barat	140 905 722,27	125 000 000,00
Kota			
13	Padang	141 868 478,29	100 508 746,10
14	Solok	130 890 066,45	142 728 451,60
15	Sawahlunto	15 830 744,00	56 643 116,00
16	Padang Panjang	145 651 338,00	59 800 000,00
17	Bukittinggi	79 573 559,56	115 524 764,00
18	Payakumbuh	60 870 393,44	44 451 049,07
19	Pariaman	77 189 993,67	72 509 896,00
Sumatera Barat		1 606 151 884,11	1 369 759 777,88

*) Data APBD

Tabel 3
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah
Provinsi Sumatera Barat Menurut Komponen Pengeluaran, 2017-2018
(Ribuan Rupiah)

No	Komponen Penerimaan	Nilai	
		2017	2018 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Belanja Daerah	5 759 818 392,40	6 642 459 403,77
1	Belanja Tidak Langsung	3 665 975 570,68	4 005 097 567,03
1.1	Belanja Pegawai	2 000 574 462,21	2 162 047 568,18
1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00
1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00
1.4	Belanja Hibah	816 868 570,30	862 463 358,10
1.5	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	759 780 368,22	810 513 475,00
1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	87 523 390,75	155 001 602,75
1.8	Belanja Tidak Terduga	1 228 779,20	15 071 563,00
2	Belanja Langsung	2 093 842 821,72	2 637 361 836,74
2.1	Belanja Pegawai	113 099 206,04	28 411 330,00
2.2	Belanja Barang dan Jasa	867 235 428,58	1 495 885 893,47
2.3	Belanja Modal	1 113 508 187,10	1 113 064 613,27
B	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	73 000 000,00	20 000 000,00
1.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah	73 000 000,00	20 000 000,00
2.	Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Pengeluaran Daerah		5 832 818 392,40	6 662 459 403,77

*) Data APBD

Tabel 3.1
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota
se-Sumatera Barat Menurut Komponen Pengeluaran, 2017-2018
(Ribuan Rupiah)

No	Komponen Penerimaan	Nilai	
		2017	2018 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Belanja Daerah	19 415 152 589,23	21 162 993 467,06
1	Belanja Tidak Langsung	9 691 728 204,44	11 068 249 170,57
1.1	Belanja Pegawai	7 772 862 924,86	8 832 163 518,69
1.2	Belanja Bunga	9 110 607,36	13 490 399,83
1.3	Belanja Subsidi	3 216 250,00	4 000 000,00
1.4	Belanja Hibah	230 889 335,14	297 737 606,05
1.5	Belanja Bantuan Sosial	19 732 632,50	40 621 303,12
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	24 288 933,35	37 542 722,65
1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1 618 553 338,80	1 786 444 779,21
1.8	Belanja Tidak Terduga	13 074 182,41	56 248 841,03
2	Belanja Langsung	9 723 424 384,80	10 094 744 296,49
2.1	Belanja Pegawai	686 605 970,64	615 109 057,58
2.2	Belanja Barang dan Jasa	4 738 346 936,17	5 009 982 521,76
2.3	Belanja Modal	4 298 471 477,98	4 469 652 717,15
B	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	209 259 831,90	175 771 667,00
1.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah	183 454 274,90	119 680 000,00
2.	Lainnya	25 805 557,00	56 091 667,00
Jumlah Pengeluaran Daerah		19 624 412 421,13	21 338 765 134,06

*) Data APBD

Tabel 3.1.1
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota
Kabupaten Kepulauan Mentawai Menurut Komponen Pengeluaran, 2017-2018
(Ribuan Rupiah)

No	Komponen Penerimaan	Nilai	
		2017	2018 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Belanja Daerah	1 011 688 194,89	1 050 389 414,87
1	Belanja Tidak Langsung	336 408 536,65	359 087 573,01
1.1	Belanja Pegawai	228 396 740,84	238 899 106,01
1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00
1.3	Belanja Subsidi	3 216 250,00	4 000 000,00
1.4	Belanja Hibah	6 206 354,00	5 324 600,00
1.5	Belanja Bantuan Sosial	333 000,00	648 000,00
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1 131 168,41	700 482,00
1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	97 125 023,40	108 515 385,00
1.8	Belanja Tidak Terduga	0,00	1 000 000,00
2	Belanja Langsung	675 279 658,24	691 301 841,86
2.1	Belanja Pegawai	112 782 889,73	102 613 857,40
2.2	Belanja Barang dan Jasa	248 816 218,70	245 328 010,34
2.3	Belanja Modal	313 680 549,81	343 359 974,12
B	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	200 000,00	16 800 000,00
1.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah	200 000,00	16 800 000,00
2.	Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Pengeluaran Daerah		1 011 888 194,89	1 067 189 414,87

*) Data APBD

Tabel 3.1.2
 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah
 Kabupaten Pesisir Selatan Menurut Komponen Pengeluaran, 2017-2018
 (Ribuan Rupiah)

No	Komponen Penerimaan	Nilai	
		2017	2018 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Belanja Daerah	1 507 585 932,64	1 561 531 734,10
1	Belanja Tidak Langsung	894 945 857,80	953 841 833,02
1.1	Belanja Pegawai	639 610 768,53	693 228 358,73
1.2	Belanja Bunga	3 103 489,06	6 860 399,83
1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00
1.4	Belanja Hibah	12 798 262,60	10 458 300,00
1.5	Belanja Bantuan Sosial	105 830,50	200 000,00
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	3 547 336,62	4 723 309,99
1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	233 802 724,86	235 871 464,47
1.8	Belanja Tidak Terduga	1 977 445,63	2 500 000,00
2	Belanja Langsung	612 640 074,84	607 689 901,08
2.1	Belanja Pegawai	64 449 828,38	77 115 602,47
2.2	Belanja Barang dan Jasa	291 275 884,73	244 599 516,37
2.3	Belanja Modal	256 914 361,73	285 974 782,24
B	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	30 751 540,00	44 500 000,00
1.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah	21 333 650,00	16 500 000,00
2.	Lainnya	9 417 890,00	28 000 000,00
Jumlah Pengeluaran Daerah		1 538 337 472,64	1 606 031 734,10

*) Data APBD

Tabel 3.1.3
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah
Kabupaten Solok Menurut Komponen Pengeluaran, 2017-2018
(Ribuan Rupiah)

No	Komponen Penerimaan	Nilai	
		2017	2018 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Belanja Daerah	1 176 599 853,20	1 166 958 421,81
1	Belanja Tidak Langsung	688 833 017,26	731 323 138,01
1.1	Belanja Pegawai	537 203 160,06	577 793 215,86
1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00
1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00
1.4	Belanja Hibah	9 591 400,00	11 512 000,00
1.5	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1 888 254,83	3 159 564,95
1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	139 167 469,21	136 358 357,20
1.8	Belanja Tidak Terduga	982 733,16	2 500 000,00
2	Belanja Langsung	487 766 835,94	435 635 283,80
2.1	Belanja Pegawai	31 986 026,39	28 096 910,85
2.2	Belanja Barang dan Jasa	251 164 143,66	218 330 520,54
2.3	Belanja Modal	204 616 665,89	189 207 852,41
B	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	9 136 450,00	3 000 000,00
1.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah	9 136 450,00	3 000 000,00
2.	Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Pengeluaran Daerah		1 185 736 303,20	1 169 958 421,81

*) Data APBD

Tabel 3.1.4
 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah
 Kabupaten Sijunjung Menurut Komponen Pengeluaran, 2017-2018
 (Ribuan Rupiah)

No	Komponen Penerimaan	Nilai	
		2017	2018 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Belanja Daerah	896 035 326,00	972 485 109,04
1	Belanja Tidak Langsung	470 706 971,00	537 130 435,25
1.1	Belanja Pegawai	340 454 929,00	410 886 246,49
1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00
1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00
1.4	Belanja Hibah	15 818 061,00	14 488 205,00
1.5	Belanja Bantuan Sosial	401 520,00	598 800,00
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1 836 153,00	1 676 313,40
1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	111 832 400,00	106 720 870,36
1.8	Belanja Tidak Terduga	363 908,00	2 760 000,00
2	Belanja Langsung	425 328 355,00	435 354 673,79
2.1	Belanja Pegawai	41 606 704,00	31 596 992,70
2.2	Belanja Barang dan Jasa	193 965 551,00	194 173 782,76
2.3	Belanja Modal	189 756 100,00	209 583 898,33
B	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	11 146 000,00	14 500 000,00
1.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah	10 000 000,00	13 000 000,00
2.	Lainnya	1 146 000,00	1 500 000,00
Jumlah Pengeluaran Daerah		907 181 326,00	986 985 109,04

*) Data APBD

Tabel 3.1.5
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah
Kabupaten Tanah Datar Menurut Komponen Pengeluaran, 2017-2018
(Ribuan Rupiah)

No	Komponen Penerimaan	Nilai	
		2017	2018 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Belanja Daerah	1 218 833 756,00	1 334 196 749,00
1	Belanja Tidak Langsung	740 119 692,00	823 918 918,00
1.1	Belanja Pegawai	562 662 727,00	598 006 764,00
1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00
1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00
1.4	Belanja Hibah	9 116 874,00	13 642 200,00
1.5	Belanja Bantuan Sosial	1 501 710,00	3 319 800,00
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2 402 245,00	3 372 296,00
1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	163 936 466,00	193 024 354,00
1.8	Belanja Tidak Terduga	499 670,00	12 553 504,00
2	Belanja Langsung	478 714 064,00	510 277 831,00
2.1	Belanja Pegawai	43 221 378,00	12 521 192,00
2.2	Belanja Barang dan Jasa	237 575 695,00	312 417 937,00
2.3	Belanja Modal	197 916 991,00	185 338 702,00
B	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	180 000,00
1.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah	0,00	180 000,00
2.	Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Pengeluaran Daerah		1 218 833 756,00	1 334 376 749,00

*) Data APBD

Tabel 3.1.6
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah
Kabupaten Padang Pariaman Menurut Komponen Pengeluaran, 2017-2018
(Ribuan Rupiah)

No	Komponen Penerimaan	Nilai	
		2017	2018 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Belanja Daerah	1 414 773 624,15	1 482 950 711,58
1	Belanja Tidak Langsung	759 420 916,09	835 408 756,62
1.1	Belanja Pegawai	608.954.417,82	646 805 822,18
1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00
1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00
1.4	Belanja Hibah	9.495.608,50	13 782 962,00
1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.965.000,00	5 765 000,00
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	4 399 861,11	7 489 000,00
1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	134 239 486,91	161 023 913,41
1.8	Belanja Tidak Terduga	366.541,75	542 059,03
2	Belanja Langsung	655 352 708,05	647 541 954,96
2.1	Belanja Pegawai	31192 655,68	24 462 013,38
2.2	Belanja Barang dan Jasa	257039 845,42	317 654 535,68
2.3	Belanja Modal	367120 206,95	305 425 405,90
B	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	12 945 000,00	18 000 000,00
1.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah	12.945.000,00	18 000 000,00
2.	Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Pengeluaran Daerah		1 427 718 624,15	1 500 950 711,58

*) Data APBD

Tabel 3.1.7
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah
Kabupaten Agam Menurut Komponen Pengeluaran, 2017-2018
(Ribuan Rupiah)

No	Komponen Penerimaan	Nilai	
		2017	2018 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Belanja Daerah	1 396 921 201,00	1 454 226 479,00
1	Belanja Tidak Langsung	800 598 903,00	875 872 602,00
1.1	Belanja Pegawai	632 915 252,00	701 458 122,00
1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00
1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00
1.4	Belanja Hibah	9 174 411,00	10 584 900,00
1.5	Belanja Bantuan Sosial	3 714 485,00	7 714 200,00
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	3 114 975,00	4 221 008,00
1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	150 102 257,00	148 394 372,00
1.8	Belanja Tidak Terduga	1 577 523,00	3 500 000,00
2	Belanja Langsung	596 322 298,00	578 353 877,00
2.1	Belanja Pegawai	41 910 345,00	41 779 054,00
2.2	Belanja Barang dan Jasa	284 396 206,00	306 654 345,00
2.3	Belanja Modal	270 015 747,00	229 920 478,00
B	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	8 700 000,00	8 700 000,00
1.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah	8 700 000,00	8 700 000,00
2.	Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Pengeluaran Daerah		1 405 621 201,00	1 462 926 479,00

*) Data APBD

Tabel 3.1.8
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Menurut Komponen Pengeluaran, 2017-2018
(Ribuan Rupiah)

No	Komponen Penerimaan	Nilai	
		2017	2018 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Belanja Daerah	1 258 249 159,00	1 333 434 021,00
1	Belanja Tidak Langsung	738 449 193,00	793 494 088,00
1.1	Belanja Pegawai	574 794 090,00	617 341 090,00
1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00
1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00
1.4	Belanja Hibah	8 182 900,00	9 172 200,00
1.5	Belanja Bantuan Sosial	3 760 313,00	6 853 150,00
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1 922 669,00	2 993 160,00
1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	147 605 497,00	142 441 210,00
1.8	Belanja Tidak Terduga	2 183 724,00	14 693 278,00
2	Belanja Langsung	519 799 966,00	539 939 933,00
2.1	Belanja Pegawai	27 074 149,00	20 336 748,00
2.2	Belanja Barang dan Jasa	259 608 390,00	264 822 861,00
2.3	Belanja Modal	233 117 427,00	254 780 324,00
B	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	3 000 000,00	3 000 000,00
1.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah	3 000 000,00	3 000 000,00
2.	Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Pengeluaran Daerah		1 261 249 159,00	1 336 434 021,00

*) Data APBD

Tabel 3.1.9
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah
Kabupaten Pasaman Menurut Komponen Pengeluaran, 2017-2018
(Ribuan Rupiah)

No	Komponen Penerimaan	Nilai	
		2017	2018 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Belanja Daerah	999 002 451,40	1 000 159 491,14
1	Belanja Tidak Langsung	521 220 633,99	575 998 634,25
1.1	Belanja Pegawai	416 858 753,64	469 866 072,02
1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00
1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00
1.4	Belanja Hibah	6 646 200,00	1 362 900,00
1.5	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	989 013,78	1 020 914,72
1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	96 726 666,57	100 748 747,51
1.8	Belanja Tidak Terduga	0,00	3 000 000,00
2	Belanja Langsung	477 781 817,41	424 160 856,89
2.1	Belanja Pegawai	18 498 632,75	12 858 164,00
2.2	Belanja Barang dan Jasa	274 346 293,65	272 973 616,80
2.3	Belanja Modal	184 936 891,01	138 329 076,09
B	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	5 593 000,00	3 000 000,00
1.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah	5 593 000,00	3 000 000,00
2.	Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Pengeluaran Daerah		1 004 595 451,40	1 003 159 491,14

*) Data APBD

Tabel 3.1.10
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah
Kabupaten Solok Selatan Menurut Komponen Pengeluaran, 2017-2018
(Ribuan Rupiah)

No	Komponen Penerimaan	Nilai	
		2017	2018 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Belanja Daerah	822 917 429,05	812 266 601,02
1	Belanja Tidak Langsung	371 079 503,60	406 706 929,00
1.1	Belanja Pegawai	277 190 299,24	314 261 357,78
1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00
1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00
1.4	Belanja Hibah	4 995 800,00	4 100 000,00
1.5	Belanja Bantuan Sosial	180 750,00	0,00
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	584 205,30	1 384 800,00
1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	86 388 386,09	86 460 771,23
1.8	Belanja Tidak Terduga	1 740 062,97	500 000,00
2	Belanja Langsung	451 837 925,45	405 559 672,01
2.1	Belanja Pegawai	15 574 973,68	9 074 318,24
2.2	Belanja Barang dan Jasa	205 528 037,88	158 163 035,14
2.3	Belanja Modal	230 734 913,89	238 322 318,64
B	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	1 690 000,00	4 500 000,00
1.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah	1 690 000,00	0,00
2.	Lainnya	0,00	4 500 000,00
Jumlah Pengeluaran Daerah		824 607 429,05	816 766 601,02

*) Data APBD

Tabel 3.1.11
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah
Kabupaten Dharmasraya Menurut Komponen Pengeluaran, 2017-2018
(Ribuan Rupiah)

No	Komponen Penerimaan	Nilai	
		2017	2018 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Belanja Daerah	935 591 361,57	929 502 300,65
1	Belanja Tidak Langsung	424 581 618,94	476 935 178,94
1.1	Belanja Pegawai	316 349 165,22	358 479 307,87
1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00
1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00
1.4	Belanja Hibah	5 621 217,58	10 794 200,00
1.5	Belanja Bantuan Sosial	184 000,00	184 000,00
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	846 609,25	1 200 000,00
1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	101 202 853,89	104 777 671,07
1.8	Belanja Tidak Terduga	377 773,00	1 500 000,00
2	Belanja Langsung	511 009 742,63	452 567 121,71
2.1	Belanja Pegawai	481 418,00	51 765 484,00
2.2	Belanja Barang dan Jasa	240 093 762,32	159 137 283,30
2.3	Belanja Modal	270 434 562,31	241 664 354,41
B	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	3 716 000,00	1 000 000,00
1.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah	3 716 000,00	1 000 000,00
2.	Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Pengeluaran Daerah		939 307 361,57	930 502 300,65

*) Data APBD

Tabel 3.1.12
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah
Kabupaten Pasaman Barat Menurut Komponen Pengeluaran, 2017-2018
(Ribuan Rupiah)

No	Komponen Penerimaan	Nilai	
		2017	2018 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Belanja Daerah	1 021 292 710,63	1 309 466 878,72
1	Belanja Tidak Langsung	461 265 093,59	620 868 029,89
1.1	Belanja Pegawai	429 708 870,74	481 547 183,19
1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00
1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00
1.4	Belanja Hibah	31 556 222,85	30 318 877,00
1.5	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	3 035 515,18
1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	104 466 454,52
1.8	Belanja Tidak Terduga	0,00	1 500 000,00
2	Belanja Langsung	560 027 617,04	688 598 848,83
2.1	Belanja Pegawai	3 478 024,26	27 529 141,92
2.2	Belanja Barang dan Jasa	293 484 158,71	279 024 183,12
2.3	Belanja Modal	263 065 434,07	382 045 523,79
B	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	2 955 000,00	3 000 000,00
1.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah	2 955 000,00	3 000 000,00
2.	Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Pengeluaran Daerah		1 024 247 710,63	1 312 466 878,72

*) Data APBD

Tabel 3.1.13
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah
Kota Padang Menurut Komponen Pengeluaran, 2017-2018
(Ribuan Rupiah)

No	Komponen Penerimaan	Nilai	
		2017	2018 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Belanja Daerah	2 077 455 348,19	2 387 533 525,60
1	Belanja Tidak Langsung	969 763 614,13	1 199 370 272,64
1.1	Belanja Pegawai	911 621 636,24	1 101 900 243,52
1.2	Belanja Bunga	4 546 933,30	5 130 000,00
1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00
1.4	Belanja Hibah	51 672 962,25	83 567 785,40
1.5	Belanja Bantuan Sosial	614 527,00	6 883 934,62
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	0,00
1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	663 064,36	888 309,10
1.8	Belanja Tidak Terduga	644 490,98	1 000 000,00
2	Belanja Langsung	1 107 691 734,06	1 188 163 252,96
2.1	Belanja Pegawai	27 682 340,25	32 579 593,41
2.2	Belanja Barang dan Jasa	682 165 984,85	740 412 082,98
2.3	Belanja Modal	397 843 408,96	415 171 576,57
B	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	5 500 000,00	40 850 000,00
1.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah	5 500 000,00	20 000 000,00
2.	Lainnya	0,00	20 850 000,00
Jumlah Pengeluaran Daerah		2 082 955 348,19	2 428 383 525,60

*) Data APBD

Tabel 3.1.14
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah
Kota Solok Menurut Komponen Pengeluaran, 2017-2018
(Ribuan Rupiah)

No	Komponen Penerimaan	Nilai	
		2017	2018 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Belanja Daerah	556 789 190,79	713 760 424,60
1	Belanja Tidak Langsung	204 598 411,90	273 772 676,74
1.1	Belanja Pegawai	197 186 784,84	258 741 495,46
1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00
1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00
1.4	Belanja Hibah	6 415 274,12	11 565 844,00
1.5	Belanja Bantuan Sosial	280 205,00	419 000,00
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	0,00
1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	511 150,02	546 337,28
1.8	Belanja Tidak Terduga	204 997,92	2 500 000,00
2	Belanja Langsung	352 190 778,89	439 987 747,86
2.1	Belanja Pegawai	15 833 362,69	20 759 122,71
2.2	Belanja Barang dan Jasa	195 874 295,02	253 409 084,70
2.3	Belanja Modal	140 483 121,18	165 819 540,45
B	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	20 960 540,00	10 075 000,00
1.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah	20 885 540,00	10 000 000,00
2.	Lainnya	75 000,00	75 000,00
Jumlah Pengeluaran Daerah		577 749 730,79	723 835 424,60

*) Data APBD

Tabel 3.1.15
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah
Kota Sawahlunto Menurut Komponen Pengeluaran, 2017-2018
(Ribuan Rupiah)

No	Komponen Penerimaan	Nilai	
		2017	2018 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Belanja Daerah	587 085 097,00	667 200 573,00
1	Belanja Tidak Langsung	266 281 497,00	316 151 595,00
1.1	Belanja Pegawai	192 528 894,00	231 793 338,00
1.2	Belanja Bunga	1 460 185,00	1 500 000,00
1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00
1.4	Belanja Hibah	7 271 242,00	17 771 121,00
1.5	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	863 196,00	989 706,00
1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	63 745 029,00	63 347 430,00
1.8	Belanja Tidak Terduga	412 951,00	750 000,00
2	Belanja Langsung	320 803 600,00	351 048 978,00
2.1	Belanja Pegawai	59 785 092,00	56 802 633,00
2.2	Belanja Barang dan Jasa	138 612 638,00	162 060 791,00
2.3	Belanja Modal	122 405 870,00	132 185 554,00
B	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	7 436 667,00	2 666 667,00
1.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah	6 270 000,00	1 500 000,00
2.	Lainnya	1 166 667,00	1 166 667,00
Jumlah Pengeluaran Daerah		594 521 764,00	669 867 240,00

*) Data APBD

Tabel 3.1.16
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah
Kota Padang Panjang Menurut Komponen Pengeluaran, 2017-2018
(Ribuan Rupiah)

No	Komponen Penerimaan	Nilai	
		2017	2018 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Belanja Daerah	608 108 212,01	687 539 222,00
1	Belanja Tidak Langsung	197 210 154,00	272 634 073,00
1.1	Belanja Pegawai	192 156 857,00	253 841 370,00
1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00
1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00
1.4	Belanja Hibah	4 466 789,00	16 632 949,00
1.5	Belanja Bantuan Sosial	108 400,00	599 754,00
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	0,00
1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	478 108,00	560 000,00
1.8	Belanja Tidak Terduga	0,00	1 000 000,00
2	Belanja Langsung	410 898 058,01	414 905 149,00
2.1	Belanja Pegawai	14 820 275,00	5 053 715,00
2.2	Belanja Barang dan Jasa	184 568 537,00	264 582 185,00
2.3	Belanja Modal	211 509 246,01	145 269 249,00
B	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	0,00
1.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah	0,00	0,00
2.	Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Pengeluaran Daerah		608 108 212,01	687 539 222,00

*) Data APBD

Tabel 3.1.17
 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah
 Kota Bukittinggi Menurut Komponen Pengeluaran, 2017-2018
 (Ribuan Rupiah)

No	Komponen Penerimaan	Nilai	
		2017	2018 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Belanja Daerah	590 688 034,80	810 988 956,00
1	Belanja Tidak Langsung	264 787 956,66	334 090 686,00
1.1	Belanja Pegawai	249 390 763,12	308 649 383,00
1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00
1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00
1.4	Belanja Hibah	11 813 560,64	19 050 184,00
1.5	Belanja Bantuan Sosial	1 244 142,00	2 773 300,00
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	0,00
1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	597 129,90	617 819,00
1.8	Belanja Tidak Terduga	1 742 361,00	3 000 000,00
2	Belanja Langsung	325 900 078,14	476 898 270,00
2.1	Belanja Pegawai	67 259 431,37	38 908 226,00
2.2	Belanja Barang dan Jasa	144 646 454,92	186 066 414,00
2.3	Belanja Modal	113 994 191,85	251 923 630,00
B	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	57 127 134,90	2 000 000,00
1.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah	43 127 134,90	2 000 000,00
2.	Lainnya	14 000 000,00	0,00
Jumlah Pengeluaran Daerah		647 815 169,70	812 988 956,00

*) Data APBD

Tabel 3.1.18
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah
Kota Payakumbuh Menurut Komponen Pengeluaran, 2017-2018
(Ribuan Rupiah)

No	Komponen Penerimaan	Nilai	
		2017	2018 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Belanja Daerah	694 223 803,93	768 043 562,78
1	Belanja Tidak Langsung	276 055 631,40	337 028 533,77
1.1	Belanja Pegawai	268 613 558,87	330 401 917,56
1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00
1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00
1.4	Belanja Hibah	6 942 395,60	5 617 405,00
1.5	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	0,00
1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	499 676,93	559 211,21
1.8	Belanja Tidak Terduga	0,00	450 000,00
2	Belanja Langsung	418 168 172,53	431 015 029,01
2.1	Belanja Pegawai	37 466 734,40	15 134 238,50
2.2	Belanja Barang dan Jasa	204 068 799,00	257 767 375,17
2.3	Belanja Modal	176 632 639,12	158 113 415,34
B	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	17 219 500,00	0,00
1.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah	17 219 500,00	0,00
2.	Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Pengeluaran Daerah		711 443 303,93	768 043 562,78

*) Data APBD

Tabel 3.1.19
 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah
 Kota Pariaman Menurut Komponen Pengeluaran, 2017-2018
 (Ribuan Rupiah)

No	Komponen Penerimaan	Nilai	
		2017	2018 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Belanja Daerah	641 311 903,00	720 359 291,16
1	Belanja Tidak Langsung	305 401 002,42	344 615 217,43
1.1	Belanja Pegawai	196 265 256,70	238 263 125,02
1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00
1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00
1.4	Belanja Hibah	13 103 800,00	7 990 973,65
1.5	Belanja Bantuan Sosial	5 338 750,00	4 662 364,50
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	763 246,06	1 576 652,41
1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	89 929 949,67	91 122 101,85
1.8	Belanja Tidak Terduga	0,00	1 000 000,00
2	Belanja Langsung	335 910 900,58	375 744 073,73
2.1	Belanja Pegawai	31 501 710,06	6 122 050,00
2.2	Belanja Barang dan Jasa	151 116 040,31	172 404 961,87
2.3	Belanja Modal	153 293 150,20	197 217 061,86
B	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	11 183 000,00	0,00
1.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah	11 183 000,00	0,00
2.	Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Pengeluaran Daerah		652 494 903,00	720 359 291,16

*) Data APBD

Tabel 4
Realisasi Belanja Daerah
Menurut Kabupaten/Kota, 2017-2018
(Ribuan Rupiah)

No	Kabupaten/Kota	Nilai	
		2017	2018 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
Kabupaten			
1	Kepulauan Mentawai	1 011 688 194,89	1 050 389 414,87
2	Pesisir Selatan	1 507 585 932,64	1 561 531 734,10
3	Solok	1 176 599 853,20	1 166 958 421,81
4	Sijunjung	896 035 326,00	972 485 109,04
5	Tanah Datar	1 218 833 756,00	1 334 196 749,00
6	Padang Pariaman	1 414 773 624,15	1 482 950 711,58
7	Agam	1 396 921 201,00	1 454 226 479,00
8	Limapuluh Kota	1 258 249 159,00	1 333 434 021,00
9	Pasaman	999 002 451,40	1 000 159 491,14
10	Solok Selatan	822 917 429,05	812 266 601,02
11	Dharmasraya	935 591 361,57	929 502 300,65
12	Pasaman Barat	1 021 292 710,63	1 309 466 878,72
Kota			
13	Padang	2 077 455 348,19	2 387 533 525,60
14	Solok	556 789 190,79	713 760 424,60
15	Sawahlunto	587 085 097,00	667 200 573,00
16	Padang Panjang	608 108 212,01	687 539 222,00
17	Bukittinggi	590 688 034,80	810 988 956,00
18	Payakumbuh	694 223 803,93	768 043 562,78
19	Pariaman	641 311 903,00	720 359 291,16
Sumatera Barat		19 415 152 589,23	21 162 993 467,06

*) Data APBD

Tabel 4.1
Realisasi Belanja Tidak Langsung
Menurut Kabupaten/Kota, 2017-2018
(Ribuan Rupiah)

No	Kabupaten/Kota	Nilai	
		2017	2018 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
Kabupaten			
1	Kepulauan Mentawai	336 408 536,65	359 087 573,01
2	Pesisir Selatan	894 945 857,80	953 841 833,02
3	Solok	688 833 017,26	731 323 138,01
4	Sijunjung	470 706 971,00	537 130 435,25
5	Tanah Datar	740 119 692,00	823 918 918,00
6	Padang Pariaman	759 420 916,09	835 408 756,62
7	Agam	800 598 903,00	875 872 602,00
8	Limapuluh Kota	738 449 193,00	793 494 088,00
9	Pasaman	521 220 633,99	575 998 634,25
10	Solok Selatan	371 079 503,60	406 706 929,00
11	Dharmasraya	424 581 618,94	476 935 178,94
12	Pasaman Barat	461 265 093,59	620 868 029,89
Kota			
13	Padang	969 763 614,13	1 199 370 272,64
14	Solok	204 598 411,90	273 772 676,74
15	Sawahlunto	266 281 497,00	316 151 595,00
16	Padang Panjang	197 210 154,00	272 634 073,00
17	Bukittinggi	264 787 956,66	334 090 686,00
18	Payakumbuh	276 055 631,40	337 028 533,77
19	Pariaman	305 401 002,42	344 615 217,43
Sumatera Barat		9 691 728 204,44	11 068 249 170,57

*) Data APBD

Tabel 4.1.1
Realisasi Belanja Tidak Langsung, Belanja Pegawai
Menurut Kabupaten/Kota, 2017-2018
(Ribuan Rupiah)

No	Kabupaten/Kota	Nilai	
		2017	2018 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
Kabupaten			
1	Kepulauan Mentawai	228 396 740,84	238 899 106,01
2	Pesisir Selatan	639 610 768,53	693 228 358,73
3	Solok	537 203 160,06	577 793 215,86
4	Sijunjung	340 454 929,00	410 886 246,49
5	Tanah Datar	562 662 727,00	598 006 764,00
6	Padang Pariaman	608 954 417,82	646 805 822,18
7	Agam	632 915 252,00	701 458 122,00
8	Limapuluh Kota	574 794 090,00	617 341 090,00
9	Pasaman	416 858 753,64	469 866 072,02
10	Solok Selatan	277 190 299,24	314 261 357,78
11	Dharmasraya	316 349 165,22	358 479 307,87
12	Pasaman Barat	429 708 870,74	481 547 183,19
Kota			
13	Padang	911 621 636,24	1 101 900 243,52
14	Solok	197 186 784,84	258 741 495,46
15	Sawahlunto	192 528 894,00	231 793 338,00
16	Padang Panjang	192 156 857,00	253 841 370,00
17	Bukittinggi	249 390 763,12	308 649 383,00
18	Payakumbuh	268 613 558,87	330 401 917,56
19	Pariaman	196 265 256,70	238 263 125,02
Sumatera Barat		7 772 862 924,86	8 832 163 518,69

*) Data APBD

Tabel 4.1.2
Realisasi Belanja Bunga
Menurut Kabupaten/Kota, 2017-2018
(Ribuan Rupiah)

No	Kabupaten/Kota	Nilai	
		2017	2018 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
Kabupaten			
1	Kepulauan Mentawai	0,00	0,00
2	Pesisir Selatan	3 103 489,06	6 860 399,83
3	Solok	0,00	0,00
4	Sijunjung	0,00	0,00
5	Tanah Datar	0,00	0,00
6	Padang Pariaman	0,00	0,00
7	Agam	0,00	0,00
8	Limapuluh Kota	0,00	0,00
9	Pasaman	0,00	0,00
10	Solok Selatan	0,00	0,00
11	Dharmasraya	0,00	0,00
12	Pasaman Barat	0,00	0,00
Kota			
13	Padang	4 546 933,30	5 130 000,00
14	Solok	0,00	0,00
15	Sawahlunto	1 460 185,00	1 500 000,00
16	Padang Panjang	0,00	0,00
17	Bukittinggi	0,00	0,00
18	Payakumbuh	0,00	0,00
19	Pariaman	0,00	0,00
Sumatera Barat		9 110 607,36	13 490 399,83

*) Data APBD

Tabel 4.1.3
Realisasi Belanja Subsidi
Menurut Kabupaten/Kota, 2017-2018
(Ribuan Rupiah)

No	Kabupaten/Kota	Nilai	
		2017	2018 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
Kabupaten			
1	Kepulauan Mentawai	3 216 250,00	4 000 000,00
2	Pesisir Selatan	0,00	0,00
3	Solok	0,00	0,00
4	Sijunjung	0,00	0,00
5	Tanah Datar	0,00	0,00
6	Padang Pariaman	0,00	0,00
7	Agam	0,00	0,00
8	Limapuluh Kota	0,00	0,00
9	Pasaman	0,00	0,00
10	Solok Selatan	0,00	0,00
11	Dharmasraya	0,00	0,00
12	Pasaman Barat	0,00	0,00
Kota			
13	Padang	0,00	0,00
14	Solok	0,00	0,00
15	Sawahlunto	0,00	0,00
16	Padang Panjang	0,00	0,00
17	Bukittinggi	0,00	0,00
18	Payakumbuh	0,00	0,00
19	Pariaman	0,00	0,00
Sumatera Barat		3 216 250,00	4 000 000,00

*) Data APBD

Tabel 4.1.4
Realisasi Belanja Hibah
Menurut Kabupaten/Kota, 2017-2018
(Ribuan Rupiah)

No	Kabupaten/Kota	Nilai	
		2017	2018 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
Kabupaten			
1	Kepulauan Mentawai	6 206 354,00	5 324 600,00
2	Pesisir Selatan	12 798 262,60	10 458 300,00
3	Solok	9 591 400,00	11 512 000,00
4	Sijunjung	15 818 061,00	14 488 205,00
5	Tanah Datar	9 116 874,00	13 642 200,00
6	Padang Pariaman	9 495 608,50	13 782 962,00
7	Agam	9 174 411,00	10 584 900,00
8	Limapuluh Kota	8 182 900,00	9 172 200,00
9	Pasaman	6 646 200,00	1 362 900,00
10	Solok Selatan	4 995 800,00	4 100 000,00
11	Dharmasraya	5 621 217,58	10 794 200,00
12	Pasaman Barat	31 556 222,85	30 318 877,00
Kota			
13	Padang	51 672 962,25	83 567 785,40
14	Solok	6 415 274,12	11 565 844,00
15	Sawahlunto	7 271 242,00	17 771 121,00
16	Padang Panjang	4 466 789,00	16 632 949,00
17	Bukittinggi	11 813 560,64	19 050 184,00
18	Payakumbuh	6 942 395,60	5 617 405,00
19	Pariaman	13 103 800,00	7 990 973,65
Sumatera Barat		230 889 335,14	297 737 606,05

*) Data APBD

Tabel 4.1.5
Realisasi Belanja Bantuan Sosial
Menurut Kabupaten/Kota, 2017-2018
(Ribuan Rupiah)

No	Kabupaten/Kota	Nilai	
		2017	2018 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
Kabupaten			
1	Kepulauan Mentawai	333 000,00	648 000,00
2	Pesisir Selatan	105 830,50	200 000,00
3	Solok	0,00	0,00
4	Sijunjung	401 520,00	598 800,00
5	Tanah Datar	1 501 710,00	3 319 800,00
6	Padang Pariaman	1 965 000,00	5 765 000,00
7	Agam	3 714 485,00	7 714 200,00
8	Limapuluh Kota	3 760 313,00	6 853 150,00
9	Pasaman	0,00	0,00
10	Solok Selatan	180 750,00	0,00
11	Dharmasraya	184 000,00	184 000,00
12	Pasaman Barat	0,00	0,00
Kota			
13	Padang	614 527,00	6 883 934,62
14	Solok	280 205,00	419 000,00
15	Sawahlunto	0,00	0,00
16	Padang Panjang	108 400,00	599 754,00
17	Bukittinggi	1 244 142,00	2 773 300,00
18	Payakumbuh	0,00	0,00
19	Pariaman	5 338 750,00	4 662 364,50
Sumatera Barat		19 732 632,50	40 621 303,12

*) Data APBD

Tabel 4.1.6
Realisasi Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota
dan Pemerintah Desa Menurut Kabupaten/Kota, 2017-2018
(Ribuan Rupiah)

No	Kabupaten/Kota	Nilai	
		2017	2018 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
Kabupaten			
1	Kepulauan Mentawai	1 131 168,41	700 482,00
2	Pesisir Selatan	3 547 336,62	4 723 309,99
3	Solok	1 888 254,83	3 159 564,95
4	Sijunjung	1 836 153,00	1 676 313,40
5	Tanah Datar	2 402 245,00	3 372 296,00
6	Padang Pariaman	4 399 861,11	7 489 000,00
7	Agam	3 114 975,00	4 221 008,00
8	Limapuluh Kota	1 922 669,00	2 993 160,00
9	Pasaman	989 013,78	1 020 914,72
10	Solok Selatan	584 205,30	1 384 800,00
11	Dharmasraya	846 609,25	1 200 000,00
12	Pasaman Barat	0,00	3 035 515,18
Kota			
13	Padang	0,00	0,00
14	Solok	0,00	0,00
15	Sawahlunto	863 196,00	989 706,00
16	Padang Panjang	0,00	0,00
17	Bukittinggi	0,00	0,00
18	Payakumbuh	0,00	0,00
19	Pariaman	763 246,06	1 576 652,41
Sumatera Barat		24 288 933,35	37 542 722,65

*) Data APBD

Tabel 4.1.7
 Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota
 Menurut Kabupaten/Kota, 2017-2018
 (Ribuan Rupiah)

No	Kabupaten/Kota	Nilai	
		2017	2018 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
Kabupaten			
1	Kepulauan Mentawai	97 125 023,40	108 515 385,00
2	Pesisir Selatan	233 802 724,86	235 871 464,47
3	Solok	139 167 469,21	136 358 357,20
4	Sijunjung	111 832 400,00	106 720 870,36
5	Tanah Datar	163 936 466,00	193 024 354,00
6	Padang Pariaman	134 239 486,91	161 023 913,41
7	Agam	150 102 257,00	148 394 372,00
8	Limapuluh Kota	147 605 497,00	142 441 210,00
9	Pasaman	96 726 666,57	100 748 747,51
10	Solok Selatan	86 388 386,09	86 460 771,23
11	Dharmasraya	101 202 853,89	104 777 671,07
12	Pasaman Barat	0,00	104 466 454,52
Kota			
13	Padang	663 064,36	888 309,10
14	Solok	511 150,02	546 337,28
15	Sawahlunto	63 745 029,00	63 347 430,00
16	Padang Panjang	478 108,00	560 000,00
17	Bukittinggi	597 129,90	617 819,00
18	Payakumbuh	0,00	559 211,21
19	Pariaman	89 929 949,67	91 122 101,85
Sumatera Barat		1 618 053 661,88	1 786 444 779,21

*) Data APBD

Tabel 4.1.8
Realisasi Belanja Tidak Terduga
Menurut Kabupaten/Kota, 2017-2018
(Ribuan Rupiah)

No	Kabupaten/Kota	Nilai	
		2017	2018 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
Kabupaten			
1	Kepulauan Mentawai	0,00	1 000 000,00
2	Pesisir Selatan	1 977 445,63	2 500 000,00
3	Solok	982 733,16	2 500 000,00
4	Sijunjung	363 908,00	2 760 000,00
5	Tanah Datar	499 670,00	12 553 504,00
6	Padang Pariaman	366 541,75	542 059,03
7	Agam	1 577 523,00	3 500 000,00
8	Limapuluh Kota	2 183 724,00	14 693 278,00
9	Pasaman	0,00	3 000 000,00
10	Solok Selatan	1 740 062,97	500 000,00
11	Dharmasraya	377 773,00	1 500 000,00
12	Pasaman Barat	0,00	1 500 000,00
Kota			
13	Padang	644 490,98	1 000 000,00
14	Solok	204 997,92	2 500 000,00
15	Sawahlunto	412 951,00	750 000,00
16	Padang Panjang	0,00	1 000 000,00
17	Bukittinggi	1 742 361,00	3 000 000,00
18	Payakumbuh	0,00	450 000,00
19	Pariaman	0,00	1 000 000,00
Sumatera Barat		13 074 182,41	56 248 841,03

*) Data APBD

Tabel 4.2
Realisasi Belanja Langsung
Menurut Kabupaten/Kota, 2017-2018
(Ribuan Rupiah)

No	Kabupaten/Kota	Nilai	
		2017	2018 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
Kabupaten			
1	Kepulauan Mentawai	675 279 658,24	691 301 841,86
2	Pesisir Selatan	612 640 074,84	607 689 901,08
3	Solok	487 766 835,94	435 635 283,80
4	Sijunjung	425 328 355,00	435 354 673,79
5	Tanah Datar	478 714 064,00	510 277 831,00
6	Padang Pariaman	655 352 708,05	647 541 954,96
7	Agam	596 322 298,00	578 353 877,00
8	Limapuluh Kota	519 799 966,00	539 939 933,00
9	Pasaman	477 781 817,41	424 160 856,89
10	Solok Selatan	451 837 925,45	405 559 672,01
11	Dharmasraya	511 009 742,63	452 567 121,71
12	Pasaman Barat	560 027 617,04	688 598 848,83
Kota			
13	Padang	1 107 691 734,06	1 188 163 252,96
14	Solok	352 190 778,89	439 987 747,86
15	Sawahlunto	320 803 600,00	351 048 978,00
16	Padang Panjang	410 898 058,01	414 905 149,00
17	Bukittinggi	325 900 078,14	476 898 270,00
18	Payakumbuh	418 168 172,53	431 015 029,01
19	Pariaman	335 910 900,58	375 744 073,73
Sumatera Barat		9 723 424 384,80	10 094 744 296,49

*) Data APBD

Tabel 4.2.1
Realisasi Belanja Langsung, Belanja Pegawai
Menurut Kabupaten/Kota, 2017-2018
(Ribuan Rupiah)

No	Kabupaten/Kota	Nilai	
		2017	2018 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
Kabupaten			
1	Kepulauan Mentawai	112 782 889,73	102 613 857,40
2	Pesisir Selatan	64 449 828,38	77 115 602,47
3	Solok	31 986 026,39	28 096 910,85
4	Sijunjung	41 606 704,00	31 596 992,70
5	Tanah Datar	43 221 378,00	12 521 192,00
6	Padang Pariaman	31 192 655,68	24 462 013,38
7	Agam	41 910 345,00	41 779 054,00
8	Limapuluh Kota	27 074 149,00	20 336 748,00
9	Pasaman	18 498 632,75	12 858 164,00
10	Solok Selatan	15 574 973,68	9 074 318,24
11	Dharmasraya	481 418,00	51 765 484,00
12	Pasaman Barat	3 478 024,26	27 529 141,92
Kota			
13	Padang	27 682 340,25	32 579 593,41
14	Solok	15 833 362,69	20 759 122,71
15	Sawahlunto	59 785 092,00	56 802 633,00
16	Padang Panjang	14 820 275,00	5 053 715,00
17	Bukittinggi	67 259 431,37	38 908 226,00
18	Payakumbuh	37 466 734,40	15 134 238,50
19	Pariaman	31 501 710,06	6 122 050,00
Sumatera Barat		686 605 970,64	615 109 057,58

*) Data APBD

Tabel 4.2.2
Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Menurut Kabupaten/Kota, 2017-2018
(Ribuan Rupiah)

No	Kabupaten/Kota	Nilai	
		2017	2018 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
Kabupaten			
1	Kepulauan Mentawai	248 816 218,70	245 328 010,34
2	Pesisir Selatan	291 275 884,73	244 599 516,37
3	Solok	251 164 143,66	218 330 520,54
4	Sijunjung	193 965 551,00	194 173 782,76
5	Tanah Datar	237 575 695,00	312 417 937,00
6	Padang Pariaman	257 039 845,42	317 654 535,68
7	Agam	284 396 206,00	306 654 345,00
8	Limapuluh Kota	259 608 390,00	264 822 861,00
9	Pasaman	274 346 293,65	272 973 616,80
10	Solok Selatan	205 528 037,88	158 163 035,14
11	Dharmasraya	240 093 762,32	159 137 283,30
12	Pasaman Barat	293 484 158,71	279 024 183,12
Kota			
13	Padang	682 165 984,85	740 412 082,98
14	Solok	195 874 295,02	253 409 084,70
15	Sawahlunto	138 612 638,00	162 060 791,00
16	Padang Panjang	184 568 537,00	264 582 185,00
17	Bukittinggi	144 646 454,92	186 066 414,00
18	Payakumbuh	204 068 799,00	257 767 375,17
19	Pariaman	151 116 040,31	172 404 961,87
Sumatera Barat		4 738 346 936,17	5 009 982 521,76

*) Data APBD

Tabel 4.2.3
Realisasi Belanja Modal
Menurut Kabupaten/Kota, 2017-2018
(Ribuan Rupiah)

No	Kabupaten/Kota	Nilai	
		2017	2018 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
Kabupaten			
1	Kepulauan Mentawai	313 680 549,81	343 359 974,12
2	Pesisir Selatan	256 914 361,73	285 974 782,24
3	Solok	204 616 665,89	189 207 852,41
4	Sijunjung	189 756 100,00	209 583 898,33
5	Tanah Datar	197 916 991,00	185 338 702,00
6	Padang Pariaman	367 120 206,95	305 425 405,90
7	Agam	270 015 747,00	229 920 478,00
8	Limapuluh Kota	233 117 427,00	254 780 324,00
9	Pasaman	184 936 891,01	138 329 076,09
10	Solok Selatan	230 734 913,89	238 322 318,64
11	Dharmasraya	270 434 562,31	241 664 354,41
12	Pasaman Barat	263 065 434,07	382 045 523,79
Kota			
13	Padang	397 843 408,96	415 171 576,57
14	Solok	140 483 121,18	165 819 540,45
15	Sawahlunto	122 405 870,00	132 185 554,00
16	Padang Panjang	211 509 246,01	145 269 249,00
17	Bukittinggi	113 994 191,85	251 923 630,00
18	Payakumbuh	176 632 639,12	158 113 415,34
19	Pariaman	153 293 150,20	197 217 061,86
Sumatera Barat		4 298 471 477,98	4 469 652 717,15

*) Data APBD

Tabel 4.2.4
Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Menurut Kabupaten/Kota, 2017-2018
(Ribuan Rupiah)

No	Kabupaten/Kota	Nilai	
		2017	2018 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
Kabupaten			
1	Kepulauan Mentawai	200 000,00	16 800 000,00
2	Pesisir Selatan	30 751 540,00	44 500 000,00
3	Solok	9 136 450,00	3 000 000,00
4	Sijunjung	11 146 000,00	14 500 000,00
5	Tanah Datar	0,00	180 000,00
6	Padang Pariaman	12 945 000,00	18 000 000,00
7	Agam	8 700 000,00	8 700 000,00
8	Limapuluh Kota	3 000 000,00	3 000 000,00
9	Pasaman	5 593 000,00	3 000 000,00
10	Solok Selatan	1 690 000,00	4 500 000,00
11	Dharmasraya	3 716 000,00	1 000 000,00
12	Pasaman Barat	2 955 000,00	3 000 000,00
Kota			
13	Padang	5 500 000,00	40 850 000,00
14	Solok	20 960 540,00	10 075 000,00
15	Sawahlunto	7 436 667,00	2 666 667,00
16	Padang Panjang	0,00	0,00
17	Bukittinggi	57 127 134,90	2 000 000,00
18	Payakumbuh	17 219 500,00	0,00
19	Pariaman	11 183 000,00	0,00
Sumatera Barat		209 259 831,90	175 771 667,00

*) Data APBD

DAFTAR PUSTAKA

BPS, 2017, Pedomen Pencacahan Survei Statistik Keuangan Daerah 2017, Jakarta, BPS

BPS, 2018, Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Sumatera Barat 2016-2017, Padang, BPS.

<https://sumbar.bps.go.id>



Sensus
Penduduk
2020

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



Badan Pusat Statistik

Provinsi Sumatera Barat

Jl. Khatib Sulaiman No. 48 Padang, 25135

Telp. 442158, 442159

E-mail : sumbar@bps.go.id

Homepage : <http://sumbar.bps.go.id>

ISSN 2477-0744



9 772477 074006